

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**JATUHNYA HINDIA BELANDA KE TANGAN JEPANG
PADA TAHUN 1942**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh

Agustinus Joko Duji Iswanto

NIM : 86214038

NIRM : 865027200035

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

1993

SKRIPSI

JATUHNYA HINDIA BELANDA KE TANGAN JEPANG
PADA TAHUN 1942

Oleh:

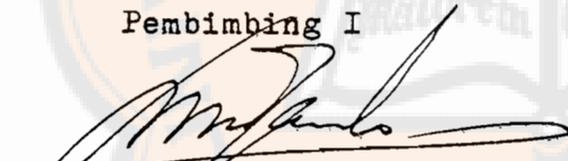
Agustinus Joko Puji Iswanto

NIM: 86214038

NIRM: 865027200035

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal revisi: 23/8- 1993

Pembimbing II



Drs. A.K. Wiharyanto

Tanggal 1993

SKRIPSI

JATUHNYA HINDIA BELANDA KE TANGAN JEPANG
PADA TAHUN 1942

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Agustinus Joko Puji Iswanto

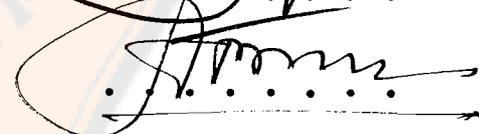
NIM: 86214038

NIRM : 865027200035

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 29 Juli 1993

Susunan Panitia Penguji

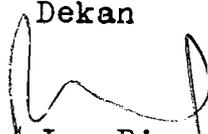
	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. J. Markiswo	
Sekretaris	Drs. A.K. Wiharyanto	
Anggota	Drs. G. Moedjanto, M.A.	
Anggota	Drs. A.K. Wiharyanto	
Anggota	Drs. J.B.M. Mudjihardjo	

Yogyakarta, 3 September 1993

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan


DR. J. Bismoko

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Melalui proses yang panjang dan penuh kesukaran, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini. Penulis menyadari akan kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas. Dengan demikian semoga pembaca dapat memaklumi karya sederhana yang jauh dari kesempurnaan ini. Skripsi ini berjudul: JATUHNYA HINDIA BELANDA KE TANGAN JEPANG PADA TAHUN 1942. ditulis berdasarkan studi kepustakaan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Penulis bersyukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, karena berkat rahmat dan lindungannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang tulus berkenaan dengan segala bimbingan, saran, petunjuk, dorongan, dan kemudahan lain yang penulis peroleh dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang sejak awal memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Segenap staf Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini;
4. Segenap staf perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan rekan-rekan yang telah membantu penyusunan skripsi ini;
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan fasilitas dan doa restu sejak dari awal hingga selesai.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai akhir kata, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa isi dan bentuk dari skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga hasil yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca guna menambah pengetahuan tentang sejarah Indonesia, khususnya dalam masa Perang Dunia II.

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

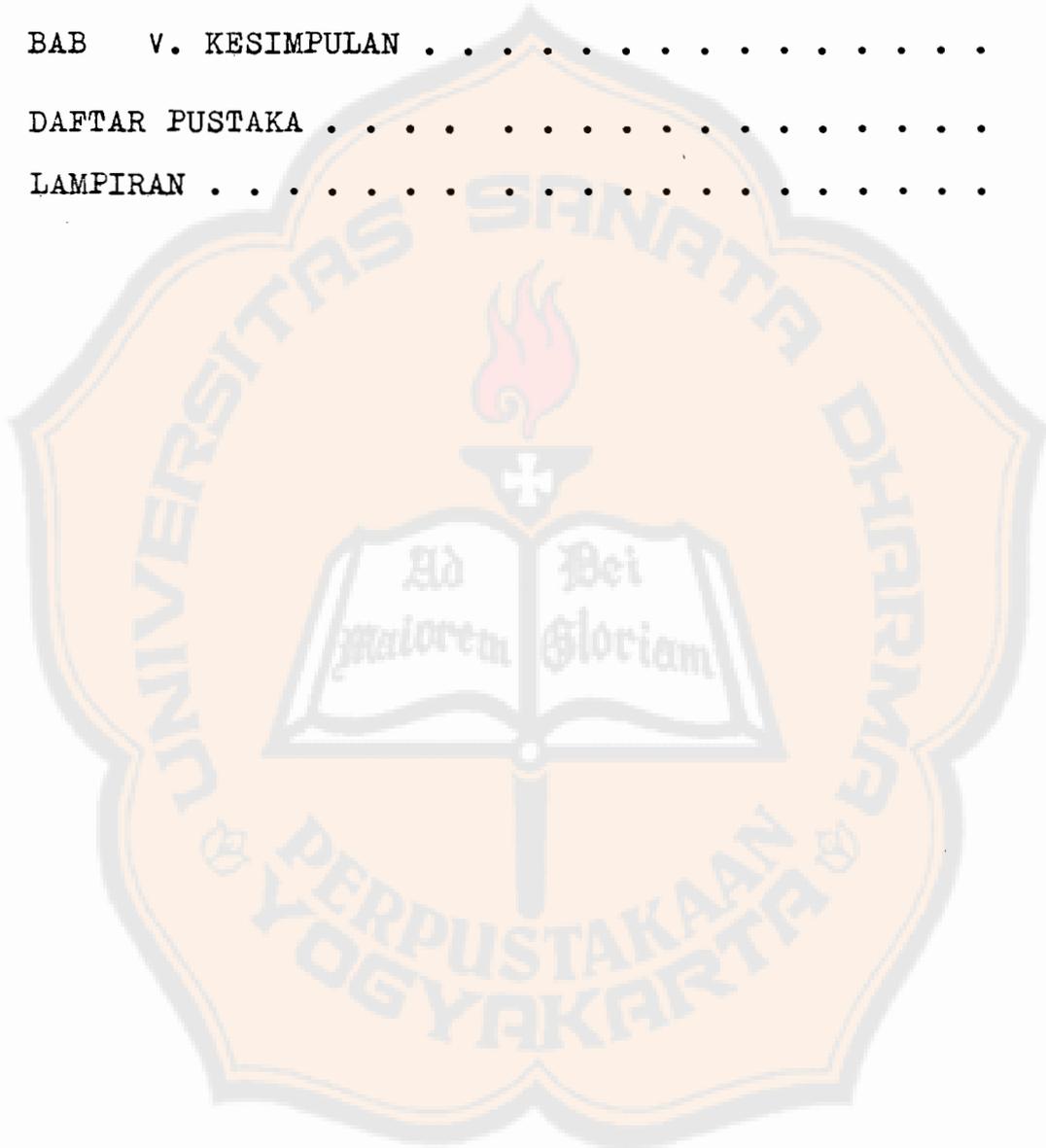
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup Permasalahan	12
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penulisan Skripsi	16
F. Metode Penulisan	17
G. Batasan Beberapa Istilah	19
BAB II. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN POLITIK EKONOMI HINDIA BELANDA TAHUN 1930-1942	20
A. Krisis Ekonomi	20
B. Pergerakan Nasional Antara Tahun 1930 1942	25
1. Sikap Pemerintah Terhadap Pergerak an Nasional	25
2. Perjuangan Pergerakan Nasional Yang Menonjol Tahun 1931-1942	32

	Halaman
C. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Menghadapi Perang Melawan Jepang	43
BAB III. NAFSU FASCISME JEPANG TERHADAP INDONE- SIA	50
A. Rencana Kemakmuran Bersama Asia Ti- mur Raya	50
B. Rencana Jepang Terhadap Wilayah Indonesia	57
1. Sebab-sebab Wilayah Indonesia Termasuk Dalam Rencana Militer Jepang	57
2. Garis Besar Rencana Jepang di Asia Tenggara	59
C. Realisasi Rencana Jepang atas Wila- yah Indonesia	61
1. Penaklukan Pulau-pulau di Luar Jawa	67
2. Pertempuran di Laut Jawa	68
3. Pertempuran di Jawa Sampai Kapi- tulasi di Kalijati	71
BAB IV. KEUNGGULAN JEPANG ATAS HINDIA BELANDA.	77
A. Letak Dukungan Rakyat	80
B. Keunggulan Personil-Materiil Mili- ter Jepang	85
1. Keunggulan Personil Militer Je- pang	85

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Halaman
2. Keunggulan dalam Peralatan Militer	90
C. Keunggulan Strategi-Organisasi Militer Jepang	94
BAB V. KESIMPULAN	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Perang Dunia II pecah akibat kegagalan Liga Bangsa-bangsa dalam menjaga perdamaian dunia dan munculnya ideologi totaliter di Jerman, Italia, dan Jepang. Di Eropa negara-negara demokratis sangat menentang ideologi totaliter tersebut. Perang yang pecah di Eropa membawa dampak terhadap perkembangan di Asia Timur dan Asia Tenggara karena wilayah tersebut banyak yang sudah dijadikan sebagai wilayah-wilayah koloni negara-negara Barat.

Indonesia yang pada saat itu menjadi wilayah koloni negeri Belanda, pengurusannya diserahkan kepada Menteri Tanah Jajahan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi di tanah jajahan. Pada saat Perang Dunia II meletus, di Hindia Belanda sedang terjadi proses pematangan nasionalisme. Proses pematangan itu secara jelas tampak berupa perjuangan dari golongan nasionalis dengan pergerakannya yang berhadapan dengan kuasa kolonial dengan berbagai macam bentuk pro dan kontra antara keduanya.

Munculnya Jepang menjadi negara Fascis di Asia merupakan ancaman bagi negara-negara Barat yang ingin tetap mempertahankan status quo-nya di wilayah koloninya masing-masing, terutama di Asia. Bagaimanapun juga Asia Tenggara terutama, merupakan sumber pendapatan yang sangat berarti bagi negerinya. Oleh karena itu pada saat Jepang juga bermaksud menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara dan Asia Timur, maka negara-negara Eropa yang berkepentingan terhadap wilayah koloninya kemudian mengangkat senjata melawan Jepang.

Jepang yang muncul sebagai negara yang telah kuat baik perekonomiannya maupun militernya, telah menunjukkan keunggulan-keunggulannya kepada bangsa-bangsa Asia dan Eropa bahwa mereka ikut bertanggung jawab terhadap

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kemajuan-kemajuan bangsa di Asia. Negara-negara Eropa yang berkepentingan atas wilayah Asia, tidak kuasa untuk menghentikan agresi Jepang secara cepat mengingat mereka juga terlibat secara langsung dalam perang di Eropa sendiri. Situasi seperti ini menguntungkan bagi Militer Jepang untuk terus melompat dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain dengan mudah. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai keadaan perang berbalik.

Menghadapi peperangan melawan Jepang, Pemerintah Hindia Belanda dalam kondisi yang lemah baik secara fisik maupun secara mental. Kelemahan itu antara lain disebabkan oleh tidak adanya dukungan personil dan materil yang memadai untuk melawan Jepang. Situasi itu bertambah buruk lagi karena negeri induknya telah melarikan diri ke London karena tidak bisa membendung serangan Jerman di wilayahnya. Demikian juga negara-negara Barat yang terikat secara demokratis tidak bisa diharapkan bantuannya yang berarti, karena masing-masing juga harus mempertahankan wilayahnya dari serangan negara totaliter.

Di wilayah Hindia Belanda Jepang juga telah menunjukkan keunggulan-keunggulannya dalam melawan tentara kolonial Hindia Belanda dengan berbagai macam kondisinya. Sejak dari rencana, persiapan, sampai pada pelaksanaan agresinya, telah ditunjukkan oleh Jepang bahwa bangsa kulit berwarna mampu mengalahkan bangsa kulit putih walaupun hanya untuk sementara saja. Mudah-mudahan Jepang merebut Indonesia dari tangan Hindia Belanda, sangat ditentukan oleh keunggulan-keunggulan Jepang dari segi militer beserta segala faktor yang mendukungnya atas Hindia Belanda dengan segala kelemahannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Dunia I diakhiri dengan serangkaian perjanjian perdamaian yang berlangsung tahun 1919, terutama perjanjian Versailles yang melibatkan negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, dan Jerman. Isi perjanjian itu pada dasarnya terdiri dari dua hal, yaitu perundingan perdamaian antara negara-negara yang keluar sebagai pemenang perang terhadap negara yang kalah perang yaitu Jerman dan menyangkut persetujuan pembentukan Leagues of Nations. Dalam perjanjian ini juga ditentukan tentang upaya memperkecil angkatan perang diantara negara-negara di Eropa dalam rangka menjaga perdamaian dan mencegah timbulnya peperangan baru lagi.

Jerman merupakan negara yang paling terpuak akibat Perang Dunia I, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomis dan politis yang harus ditanggung oleh Republik Weimar.¹ Kesulitan ekonomis itu lebih dirasakan lagi pada saat krisis ekonomi memuncak pada tahun 1929. Krisis itu sendiri sebetulnya bermula dari Amerika Serikat dimana ta-

¹Republik Weimar adalah pemerintahan resmi Jerman tahun 1919-1933 yang berdasar konstitusi Republik Demokrasi yang ditetapkan di Weimar tahun 1919.

rif-tarif dan harga-harga hasil industri Amerika Serikat yang terlalu tinggi sehingga Eropa tidak mampu membelinya.²

Masa antara tahun 1919-1939 sering disebut sebagai masa peletakan senjata yang panjang, namun dalam masa ini terjadi beberapa ketegangan baik sosial maupun ideologis. Hal yang melatarbelakangi timbulnya Perang Dunia II dalam hal ini antara lain kegagalan negara-negara demokrasi dalam mencapai stabilitas ekonomi sehingga memunculkan banyak kegelisahan diantara negara-negara di dunia. Munculnya Jerman, Italia, (dan Jepang) dalam satu pihak yang berdalih sebagai bangsa yang tidak punya dan tidak diberi kesempatan yang sama dalam penguasaan bahan mentah, pasaran Dunia dan penanaman modal, disamping negara-negara Eropa lain yang merasa lebih berkuasa karena menganggap dirinya sebagai pemenang dalam Perang Dunia I.

Liga Bangsa-bangsa yang berbentuk berdasarkan usul Wilson akhirnya gagal dalam menciptakan perdamaian bersama. Dengan demikian beberapa anggota seperti Jerman, Jepang (dan Amerika Serikat) menempuh jalannya sendiri dengan keluar dari keanggotaan Liga Bangsa-bangsa untuk lebih bebas bergerak. Liga Bangsa-bangsa juga gagal dalam memprakarsai dan mempertahankan peletakan senjata-

²Franklin Escher, Garis-garis Besar Sejarah Amerika (Universitas Georgia: Washington DC,-), hal. 131.

sehingga masing-masing anggota saling berlomba untuk memperkuat militernya dengan segala persenjataannya.

Terbentuknya negara-negara totaliter seperti Jerman, Italia, Jepang yang kemudian terikat dalam Anti Komintern Pact pada tahun 1936, menyebabkan timbulnya saling kecurigaan diantara negara-negara di Eropa. Perang Dunia II yang disebabkan oleh kegagalan Liga Bangsa-bangsa dalam menciptakan perdamaian bersama itu, ditunjukkan oleh tindakan Jerman dalam menyerbu dan menguasai wilayah sekitar Sungai Rhein, dan menyatukan Austria dengan Jerman dua tahun kemudian. Tindakan itu juga ditunjukkan oleh Italia dengan melakukan penyerbuan ke daerah Amerika Serikat sendiri justru tidak masuk dalam keanggotaan Liga Bangsa-bangsa karena merasa khawatir akan nasib Monroe (Doctrin) nya walaupun Amerika Serikat yang pertama-tama mengusulkan dibentuknya suatu lembaga Internasional yang bertugas menjaga perdamaian dunia.

Negara-negara demokrasi di Eropa terutama Inggris dan Perancis merasa belum siap menghadapi perang besar. Untuk menghindari terjadinya perang, kedua negara itu mencoba berdiplomasi dengan Jerman yang berlangsung di Munich pada tahun 1938. Isi pokok perundingan tersebut antara lain penyerahan sebagian daerah Cekoslovakia kepada Jerman, tetapi Jerman tidak mau menerima sebagian daerah itu saja. Hasrat Jerman kemudian direalisasikan dengan pendudukan seluruh daerah Cekoslovakia pada bulan Maret 1939. Dengan demikian upaya Inggris-Perancis mene-

mui hambatan. Upaya Inggris dan Perancis dilanjutkan dengan berunding dengan Rusia. Tetapi sebelum perundingan itu bisa terlaksana Hitler telah mendahului membuat perjanjian dengan Stalin pada bulan Agustus 1939 yang pada prinsipnya mereka tidak akan saling menyerang dengan jaminan Polandia akan dibagi dua. Hitler merasa perlu membuat perjanjian ini mengingat bahwa jika Jerman harus juga berperang melawan Rusia, maka kekuatan Jerman akan terpecah kedalam dua front peperangan. Dengan demikian Jerman dapat mengkonsentrasikan kekuatannya untuk melawan Inggris dan Perancis serta negara-negara Eropa lain.

Perang Dunia II secara resmi pecah pada tanggal 1 September 1939 dengan serbuan Jerman ke Polandia. Hari berikutnya ada sambutan dari Inggris dan diikuti oleh sekutu-sekutunya dengan menyatakan perang melawan Jerman. Dengan menggunakan taktik "perang kilat" tentara Jerman menyerbu daerah Polandia, yang akhirnya dapat dikuasainya. Sesuai perjanjiannya dengan Stalin, maka wilayah Polandia bagian barat (Danzig) dikuasai oleh Jerman dan Polandia bagian Timur diberikan pada Rusia.

Jerman melanjutkan serangannya ke bagian barat (dari sebelah timur sudah dijamin oleh Rusia) yaitu ke daerah Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia dan Luxemburg. Tentara Jerman berhasil memukul mundur tentara Inggris yang berada di wilayah tersebut. Dari Belgia tentara Jerman terus menyeberang ke daerah selatan dimana terdapat pertahanan Perancis di Sedan sampai berhasil dite-

robosnya. Demikian juga tentara Inggris terus berhasil dipukul mundur oleh Jerman. Pemerintahan Perancis akhirnya melarikan diri dan mendirikan pemerintahannya di Vichy di bawah pimpinan Jenderal Petain.

Italia yang pada awal mulanya bersikap diam dahulu sambil melihat perkembangan yang terjadi, akhirnya ikut menyerang daerah Perancis. Serangan itu juga ditujukan ke daerah Yunani, namun tidak berhasil menguasainya. Di Laut Tengah armada Italia juga dapat dipukul mundur oleh armada Inggris. Sesuai dengan persekutuannya dengan Jerman, maka Italia akhirnya minta bantuan tentara Jerman.

Serangan Jerman ke jantung pertahanan Inggris terus dilanjutkan. Ada upaya untuk berunding dengan Inggris tetapi ditolak oleh Inggris, sehingga serangan udara yang lebih seru dilancarkan Jerman. Hal ini membuat korban berjatuhan dalam jumlah yang besar dengan maksud untuk mematahkan moril dan mengacaukan penduduk. Dengan andalan Royal Air Force-nya Inggris berusaha melawan angkatan udara Jerman dengan segala daya upaya, namun akhirnya serangan terhadap Inggris justru dihentikan dengan tiba-tiba.

Serangan Jerman dialihkan ke daerah Rumania, di mana akhirnya raja Karol berhasil melarikan diri. Untuk mencegah pertempuran maka raja Hongaria dan Bulgaria mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan Jerman. Dengan demikian Jerman tanpa hambatan, bisa melanjutkan serangannya ke daerah Yugoslavia dan Yunani. Kedua ne-

gara itu akhirnya menyerah pada Jerman, sehingga sebagian besar daratan Eropa bisa dikuasai Jerman.

Jika Jerman yang muncul sebagai negara totaliter di Eropa (di samping Italia), maka Jepang juga muncul sebagai negara totaliter di Asia. Jepang menjadi suatu negara yang agresif dan kuat sesudah revolusi politik dan ekonomi yang lebih dikenal dengan restorasi Meiji. Dalam proses industrialisasi selanjutnya Jepang terpaksa menuju ke ekspansionisme yang bersifat imperialistis. Hal ini bertujuan mencari pasar-pasar baru bagi hasil industrinya di samping mencari bahan mentah dan bahan tambang.³

Sejak tahun 1895 sebetulnya Jepang sudah memulai ekspansinya ke wilayah China, juga pada tahun 1905 dengan berperang melawan Rusia. Namun demikian nafsu ekspansinya hanya terbatas pada negara tetangga terdekat dengan Jepang. Dalam masa Perang Dunia I kekuatan Jepang masih berada di bawah kekuatan Barat yang memiliki wilayah koloni di Asia Tenggara, bahkan sampai dengan tahun 1930-an. Pada tahun 1932 Jepang berhasil menduduki Manchuria secara keseluruhan. Liga Bangsa-bangsa yang bercampur tangan karena adanya berbagai protes dari China dan Amerika Serikat, tidak diperhatikan oleh Jepang bahkan menyatakan diri keluar dari Liga Bangsa-bangsa.

³Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hal. 10

Pada saat Perang Dunia II meletus di Eropa, Asia Tenggara secara otomatis harus mengikuti atau terkena dampak perang itu sendiri. Hal itu disebabkan karena beberapa wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah koloni negara-negara Eropa. Wilayah koloni itu antara lain Burma-Malaysia-Singapura yang dikuasai Inggris; Filipina (dan wilayah Pasifik) yang dikuasai Amerika Serikat; Indonesia yang dikuasai Hindia Belanda; dan sebagian Indo China yang berada di bawah pengaruh Perancis Vichy.

Jika Jepang ingin meluaskan wilayahnya, maka Jepang harus berperang melawan negara-negara Eropa yang menjadi negeri induk dari wilayah koloni di Asia Tenggara. Perluasan perang Jepang ke China Selatan setelah mendirikan negara Manchukuo dan kemenangan-kemenangannya di China Utara menyebabkan timbulnya suatu ketegangan yang makin tajam dengan negara-negara Barat. Peperangan-peperangan itu makin lama berubah menjadi suatu permusuhan antara Jepang dengan Inggris, Amerika Serikat dan Perancis di lain pihak. Pada akhirnya Perancis Vichi harus strategis dan beberapa lapangan terbang oleh angkatan Udara dan Angkatan Laut Jepang. Dengan demikian kesempatan Jepang untuk memulai suatu perang pembentukan "Orde Baru" bagi kemakmuran dan keadilan bersama di Asia menjadi semakin terbuka.

Melihat tindakan Jepang di Indocina tersebut, Amerika Serikat menjadi curiga dan berusaha mencegah perluasan wilayah Jepang ke negara-negara berikutnya. Usaha

Amerika Serikat antara lain mengadakan embargo dan pembekuan semua modal Jepang yang ditanam di Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Desember 1941 secara tiba-tiba Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Pada hari berikutnya Amerika Serikat dan Inggris menyatakan perang melawan Jepang. Hal ini berarti perhatian kekuatan militer Inggris dan Amerika terbagi dalam dua front. Di satu pihak di Asia pasukannya harus menghadapi Jepang dan di lain pihak di Eropa harus menghadapi Jerman dan Italia.

Secara serentak Jepang kemudian melakukan penyerangan-penyerangan ke wilayah Asia Tenggara. Setelah penyerangan Jepang ke Pearl Harbour juga dilakukan pendaratan-pendaratan di barat laut Malaya, pulau Luzon dan Filipina. Di samping itu dari Indocina Jepang terus menyeberang ke Siam dan terus memasuki wilayah Malaya lewat Jalur Utara. Setelah menguasai Johor Jepang melanjutkan penguasaannya di wilayah pantai dan dilanjutkan juga dengan penyerangan wilayah Singapura yang berhasil dikuasai pada tanggal 14 Februari 1942.⁴

Demikian halnya dengan peperangannya di Filipina, setelah Jepang mendarat di berbagai tempat di Filipina. Pada pertengahan tahun 1942 di bawah pengaruh kekuasaan Jepang. Dari Filipina Jepang melanjutkan penyerangan ke

⁴Djajusman, Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda KNIL (Bandung: Angkasa, 1978), hal. 73

daerah Brunai dan Serawak yang berhasil dikuasai dengan singkat pada tanggal 6 Januari 1942. Pendaratan - pendaratan dan penyerangan-penyerangan ke daerah Selatan seperti Sulawesi Utara, Kalimantan, Sumatera, Timor dan lain-lain secara serentak dapat dikuasai.

Usaha Jepang untuk terus menduduki Hindia Belanda kemudian ditujukan untuk pengejaran pasukan Amerika Serikat yang melarikan diri ke daerah Australia. Dengan perlawanan yang cukup seru di Laut Jawa akhirnya pasukan Sekutu dapat dikalahkan. Dengan demikian tujuan untuk menguasai jantung pertahanan Hindia Belanda semakin terbuka. Dalam pertempuran yang hanya berlangsung delapan hari lamanya, akhirnya Hindia Belanda menyerah pada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 dengan kapitulasi/ penyerahan tak bersyarat di Kalijati.

Demikianlah setelah melalui pertempuran-pertempuran singkat, Jepang berhasil menguasai wilayah Asia Tenggara (walau hanya untuk sementara sampai keadaan perang berbalik). Penguasaan-penguasaan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya dan di wilayah Hindia Belanda khususnya, dapat berjalan dengan singkat. Di samping rencana-rencana Jepang untuk penguasaan ekonomis wilayah Asia Tenggara, pada prinsipnya Jepang telah menunjukkan suatu negara di Asia yang dapat dikatakan sebagai negara maju dalam bidang ekonomi dan militer pada waktu itu. Di samping sebagai negara yang kuat secara ekonomis masih banyak faktor yang menyebabkan Jepang dapat dengan singkat

menguasai wilayah Asia Tenggara.

B. Rumusan Permasalahan

Bertolak dari uraian di atas, muncul beberapa permasalahan sekitar Jatuhnya Hindia Belanda ke Tangan Jepang dalam masa Perang Dunia II.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya suatu peristiwa selalu dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Demikian juga dalam skripsi ini, dimana mudahnya Jepang dalam merebut Indonesia juga dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya.

Skripsi ini mengambil topik Jatuhnya Hindia Belanda ke Tangan Jepang pada tahun 1942. Untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, perlu dilihat bagaimana situasi politik ekonomi Hindia Belanda sebelum serbuan Jepang. Secara terperinci akan mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan situasi politik itu antara lain:

1. Apa pengaruh krisis ekonomi dunia terhadap Indonesia?
2. Bagaimana perjuangan Pergerakan Nasional yang menonjol antara tahun 1930-1942, dan bagaimana pula sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap Pergerakan Nasional tersebut?
3. Apa saja kebijakan-kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam mempersiapkan perang melawan Jepang?

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa Perang Dunia II di Eropa akhirnya berkobar juga di Asia Tenggara. Faktor yang mempengaruhinya disamping negara-negara Barat memiliki wilayah koloni di Asia Tenggara, juga oleh karena di Asia sendiri muncul negara yang menjadi fasistis sifatnya, yaitu Jepang. Jepang menjadi fasistis oleh karena tekanan kepentingan ekonomis untuk memperluas pasaran industrinya, mencari bahan baku, dan mencari wilayah baru bagi penduduknya yang telah melimpah. Mengingat di Asia Tenggara sendiri sudah banyak yang menjadi wilayah koloni negara-negara Barat, maka jalan satu-satunya adalah dengan merebutnya dari kekuasaan negara-negara Barat itu. Untuk mendapatkan jawaban atas sebab-sebab Jepang mudah merebut Indonesia, perlu diketahui juga aspek-aspek antara lain nafsu fasisme Jepang, yang mencakup:

1. Apa maksud dan tujuan Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya?
2. Bagaimana rencana Jepang terhadap wilayah Hindia Belanda, termasuk juga mengapa Jepang tertarik pada wilayah Hindia Belanda dan bagaimana garis besar rencana Jepang terhadap wilayah tersebut ?
3. Bagaimana realisasi rencana Jepang terhadap wilayah Hindia Belanda?

Jika dibandingkan dengan perang-perang yang lain, serangan Jepang di Asia Tenggara dapat terlaksana dengan cepat. Asia Tenggara memang merupakan wilayah koloni-

koloni negara-negara Barat yang terikat secara psikologis sebagai negara-negara demokratis, akan tetapi Jepang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkannya. Demikian juga terhadap wilayah Hindia Belanda, Jepang menunjukkan keunggulannya tersendiri. Dimanakah letak keunggulan Jepang atas Hindia Belanda?

1. Dimana letak keunggulan Jepang dalam memperoleh dukungan rakyat Indonesia walaupun tidak secara langsung, yang mencakup juga apa kelemahan Hindia Belanda dalam memperoleh dukungan rakyat dalam perang melawan Jepang?
2. Sejauh mana keunggulan personil dan peralatan militer Jepang atas personil dan material militer Hindia Belanda?
3. Sejauh mana keunggulan strategi organisasi perang militer Jepang dengan strategi organisasi perang Sekutu pada umumnya dan Hindia Belanda khususnya?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Mengingat peristiwa sejarah merupakan suatu rantai kejadian-kejadian yang saling terkait, seperti juga dalam hal perang Jepang melawan Hindia Belanda yang berakhir pada tanggal 8 Maret 1942, maka pembahasan skripsi ini hanya dibatasi atau mengambil ruang lingkup sampai dengan 8 Maret 1942. Untuk sampai pada kejadian-kejadian itu, akan dibahas tentang kejadian-kejadian atau situasi

yang melatarbelakanginya.

Pembatasan ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini menggunakan batasan kurun waktu dari tahun 1930 sampai tahun 1942 tepatnya pada saat kapitulasi di Kalijati. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa pada tahun 1930-an dilihat ada peristiwa-peristiwa penting yang terkait erat dengan Jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Secara sepintas dapat dilihat bahwa Jepang menjadi fascistis sifatnya mulai tahun 1930-an dimana Jepang mulai mengembangkan lembaga totaliternya secara berangsur-angsur. Sifat totaliter Jepang tersebut kemudian mengarahkan Jepang untuk melakukan ekspansi wilayah di Asia Timur.

Alasan kedua, bahwa pemerintah Hindia Belanda pada kurun waktu 1930-an menghadapi berbagai macam kesulitan tetapi masih tetap bersikap kaku dan angkuh terhadap pergerakan nasional. Kesulitan ekonomi dalam masa ini berpengaruh juga terhadap sikap pemerintah terhadap pergerakan nasional. Sikap dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu menimbulkan suatu sikap yang apatis dan pasif dari kalangan rakyat Indonesia, yang berarti sulit mencari dukungan dalam menghadapi ancaman perang dari luar.

Ketiga, krisis ekonomi yang memuncak pada tahun 1930-an juga mempengaruhi perkembangan negara-negara Eropa. Jerman dan Italia juga telah berubah menjadi suatu negara fascis yang juga bermaksud melakukan ekspansi ke

luar wilayahnya dalam rangka mencari "Lebensraum" bagi kepentingan populasi dan ekonomisnya. Hal ini selanjutnya berdampak terhadap negara-negara Eropa khususnya Inggris dan Belanda yang memiliki wilayah di Asia Tenggara dalam upaya mempertahankan otonominya.

Dalam pembahasan skripsi ini akan ditampilkan beberapa peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 1930-an - 1942. Namun demikian penampilan peristiwa-peristiwa tersebut masih akan dibatasi pada prioritas dimana peristiwa-peristiwa yang dianggap cukup erat kaitannya dengan topik pembahasan skripsi ini saja. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan suatu rangkaian sejarah yang utuh dan saling terkait satu sama lain. Untuk lebih jelasnya akan dilihat gambaran sekilas tentang pembahasan topik ini dalam pokok-pokok berikut ini.

Bab II akan membahas tentang latar belakang politik Hindia Belanda dalam kurun waktu 1930-an - 1942. Hal ini akan mencakup pembahasan tentang krisis ekonomi dan dampaknya terhadap politik maupun ekonomi Hindia Belanda. Termasuk dalam pembahasan dalam bagian ini tentang perjuangan beberapa perjuangan pergerakan nasional pada masa-masa akhir kolonialisasi Belanda di Indonesia. Sikap dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengantisipasi keadaan yang berupa ancaman serangan dari Jepang yang sudah memulai movenya di beberapa wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, juga akan menjadi bahasan dalam topik ini.

Dalam Bab III akan dibahas tentang nafsu fasisme Jepang baik di Asia Tenggara maupun terhadap wilayah Hindia Belanda. Hal ini akan mencakup pembahasan tentang Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, dimana di dalamnya ada suatu maksud ekonomis dan politis dari ekspansi Jepang. Keterikatan Jepang terhadap wilayah Indonesia merupakan alasan tersendiri mengapa Jepang memasukkan wilayah Indonesia dalam rencana tersebut.

Bab IV merupakan penekanan dari seluruh isi skripsi dimana banyak analisa data yang lebih banyak disajikan. Dalam bagian ini akan dicari tentang letak keunggulan yang sebenarnya dari kekuatan Jepang atas Hindia Belanda, baik dari segi dukungan rakyat Indonesia, personil perang, material perang, dan strategi-organisasi perang baik antara Jepang sendiri maupun Hindia Belanda - Sekutu pada umumnya. Disamping menunjukkan keunggulan dari masing-masing pihak, juga akan ditampilkan tentang kelemahannya juga diantara Hindia Belanda sendiri dan Sekutu pada umumnya dalam perang yang berlangsung pada tahun 1942 di Wilayah Hindia Belanda.

Bab V merupakan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Benang merah yang dapat ditarik dari uraian bagian-bagian sebelumnya dari skripsi inilah yang ingin ditampilkan oleh penulis untuk mendapatkan suatu gambaran tentang sebab-sebab mengapa Jepang begitu mudah merebut Indonesia dari tangan Hindia Belanda.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka skripsi ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang analitis tentang jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang pada tahun 1942. Disamping itu juga untuk melihat latar belakang kehidupan politik ekonomi dan sosial Hindia Belanda dalam kurun waktu tahun 1930-an sampai tahun 1942, terutama dimulai pada saat meletusnya krisis ekonomi sampai pada saat kapitulasi penyerahan tak bersyarat Hindia Belanda kepada Jepang di Kalijati pada tanggal 9 Maret 1942. Dengan demikian akan didapat suatu deskripsi yang lebih lengkap tentang Sejarah Indonesia dalam masa Perang Dunia II.

E. Manfaat Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini didasarkan pertimbangan manfaat di bawah ini:

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengangkat dan memperlihatkan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang dalam tahun 1942 atau dalam masa Perang Dunia II.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi tentang keterlibatan atau dampak Indonesia dalam Perang Dunia II, dengan berbagai macam latar belakangnya.
3. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat me-

nambah khasanah pustaka sejarah terutama Sejarah Indonesia khususnya dalam masa Perang Dunia II.

F. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi dan analisis tentang jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang pada tahun 1942. Berdasarkan tujuan ini maka metode yang dirasa tepat adalah metode deskriptik-analitik. Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka. Sebagai sumber utama dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda, Jakarta, Gramedia, 1988.
2. C. Bijkerk, Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di saat Yang Lebih Baik (Dokumenter Runtuhnya Hindia Belanda), Jakarta, Djambatan, 1988.
3. Djajusman, Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda KNIL, Bandung, Angkasa, 1978.
4. A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta, Dian Rakyat, 1977.
5. J.M. Pluvier, Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia tahun 1930-1942, stensil.

Sumber atau informasi itu dikumpulkan lalu diadakan kritik sumber secara intern dan ekstern. Selanjutnya diada-

kan analisis data atas informasi tersebut. Langkah selanjutnya menafsirkan atau menginterpretasi data berdasarkan aspek historis dan kronologis. Akhir dari langkah ini adalah mengadakan penyusunan skripsi ini.

Demikian metode yang digunakan dalam penyusunan atau pembuatan skripsi ini.

G. Batasan Beberapa Istilah

Di bawah ini terdapat beberapa rumusan istilah dan pengertiannya yang bertujuan untuk menyamakan pengertian antara pembaca dan penulis. Adapun rumusan istilah itu antara lain:

1. Hindia Belanda : menunjuk pada suatu pemerintahan kolonial buatan Belanda yang mencakup wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian bagian barat, dan Kepulauan Nusa Tenggara.
2. Indonesia : menunjuk nama kepulauan yang merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Jadi istilah Indonesia belum menunjukkan pengertian sebagai suatu negara, tetapi lebih ditekankan sebagai suatu nama rangkaian kepulauan

3. Politik : yang menjadi jajahan Belanda.
: adalah hal-hal yang berhubungan pemerintahan, lembaga - lembaga dan proses politik, Pressures groups, hubungan internasional, dan data pemerintahan.⁵

Selain itu masih ada beberapa istilah, namun istilah-istilah tersebut sudah merupakan suatu pengertian umum dan diharapkan tidak akan mengubah pengertiannya baik yang dimaksudkan penulis maupun pembaca.

Demikianlah beberapa catatan yang perlu untuk mengantar dan mempermudah pembaca dalam mengikuti uraian dalam skripsi ini. Dalam bab berikut akan segera diuraikan keadaan politik dan ekonomis Hindia Belanda tahun 1930-1942, yang melatar belakangi jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang pada tahun 1942.

⁵Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: lkhtiar Baru-van Hoeve, 1984), hal. 247.

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN POLITIK EKONOMI

HINDIA BELANDA TAHUN 1930-1942

A. Krisis Ekonomi

Pada awal tahun 1930-an situasi dunia ditandai dengan menjalarnya krisis ekonomi yang lebih banyak dikenal sebagai 'malaise'. Krisis ekonomi tersebut melanda hampir seluruh dunia dan berakar sejak adanya revolusi industri, dimana terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Jika dilihat pada pasca Perang Dunia I, banyak negara yang mengalami kehancuran baik secara politis maupun ekonomis. Hal itu tidak terjadi pada negara Amerika Serikat, yang tidak terpakai menjadi kancah peperangan, sehingga dapat terus membangun industri-industrinya secara berlebihan. Over produksi yang terjadi akhirnya tidak dapat diimbangi dengan kemampuan atau daya beli masyarakat, khususnya negara-negara di Eropa. Berkurangnya daya beli itu disebabkan antara lain oleh Jerman yang karena perjanjian Versailles diwajibkan membayar pampasan perang kepada negara-negara pemenang. Sebab lain adalah adanya politik swadeshi di India dan adanya perang saudara di Tiongkok.

Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi itu sendiri telah diupayakan, antara lain dengan mengadakan pengu-

rangan secara besar-besaran terhadap para buruh perusahaan, penurunan upah tenaga kerja, mengadakan proteksi terhadap barang-barang hasil industrinya dengan mengadakan tarif yang tinggi bagi barang-barang dari luar negeri yang akan masuk ke negaranya. Dampak yang terjadi tampak dengan adanya banyak warga yang menjadi penganggur, sehingga kesejahteraan menjadi semakin merosot.

Negara-negara jajahan juga sangat terpukul oleh adanya krisis ekonomi tersebut. Wilayah koloni yang diharapkan dapat digunakan sebagai wilayah potensial bagi peningkatan pendapatan negara-negara induk, sehingga ada tuntutan agar dapat menghasilkan produksi baik pertanian maupun perkebunan. Tuntutan tersebut akhirnya juga tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan diantara pekerja-pekerjanya.

Di Indonesia yang dalam status jajahan Nederland, rakyat yang terutama menderita dengan adanya krisis ekonomi tersebut.⁶ Nederland memandang wilayah seberang sebagai sarana yang ampuh untuk secara aktif mengatasi krisis ekonomi di negeri induk dengan mengalirkan keuntungan-keuntungan. Untuk mencapai tingkat biaya produksi yang seminimal mungkin diadakan pemecatan-pemecatan terhadap kaum buruh disamping penekanan upah minimum. Semua itu merupakan politik ekonomi yang disatu pihak mengada-

⁶J.M. Pluvier, Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia Th. 1930-1942 (stensil)

kan atau menjalankan penghematan secara besar-besaran, tetapi di lain pihak hendak mempertahankan pendapatan eksport terutama yang diperoleh dari hasil perkebunan dan pertanian tanpa mendevaluasikan nilai guldenya.

Jika negara-negara lain mengadakan langkah pertama dengan mendevaluasikan nilai mata uangnya dalam pemecahan krisis ekonomi dan juga meninggalkan standar emasnya, maka Hindia Belanda baru menempuhnya pada tahun 1935.⁷ Dengan penurunan nilai mata uangnya diharapkan jumlah nilai valuta dalam bentuk uang dan barang dapat sebanding disamping barang-barang produksi dapat dijangkau oleh pembeli dalam hal ini negara lain. Keterlambatan penurunan nilai mata uang dan meninggalkan standar emas oleh Hindia Belanda justeru membuat ekspor hasil-hasil produksi Hindia Belanda sulit dijangkau oleh negara-negara lain. Yang tampak menyolok misalnya Jepang yang telah lama meninggalkan nilai mata uangnya dan meninggalkan standar emasnya, dapat meningkatkan eksportnya ke Hindia Belanda dari 11% menjadi 35% dari seluruh ekspor Indonesia. Apalagi dengan politik dumping-nya membuat Hindia Belanda lebih mudah dibanjiri oleh barang-barang 'made in Japan'.

Untuk mengantisipasi dan melindungi barang-barang hasil produksi perusahaan-perusahaan Hindia Belanda, maka pemerintah membuat Undang-undang untuk membatasi im-

⁷ Onghokham, op.cit., hal. 23

por dari Jepang. Langkah lainnya antara lain membuat UU perkapalan dengan memberikan monopoli kepada perusahaan kapal negeri sebagai alat transportasi di Hindia Belanda. Terdapat juga Undang-undang nelayan yang melarang orang asing melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Hindia Belanda. Dengan demikian diharapkan otoritas perusahaan-perusahaan Hindia Belanda tetap dapat dipertahankan. Demikian juga hasil pertanian dan perkebunan dapat dilindungi tanpa harus mengalami defisit antara ekspor dengan importnya.

Akibat adanya krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis itu sendiri, rakyatlah yang terkena secara langsung. Pengurangan tenaga kerja dan penekanan upah minimum menyebabkan penderitaan rakyat, yang berupa kenaikan jumlah pengangguran dan penurunan kesejahteraan dalam arti yang luas. Situasi seperti itu juga memperdalam jurang pemisah antara kaum kolonialis yang menampakkan kesombongannya dan rakyat dengan segala penderitaannya. Pertanian tradisional juga terpukul oleh krisis tersebut, akan tetapi jumlah pekerja yang terjun dalam pertanian tradisional terus bertambah karena para pekerja yang terkena pemecatan pada umumnya kembali ke desa-desa dan mencari nafkah dengan bekerja di perkebunan-perkebunan rakyat dan persawahan tradisional.

Dalam bidang politik, krisis tersebut juga mempunyai pengaruh yang besar walaupun tidak secara langsung. Jurang pemisah yang dalam dapat menimbulkan aspirasi pa-

da tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti misalnya Thamrin, Sutarjo dan lain-lain untuk memperjuangkan nasib rakyat melalui diplomasi dengan pemerintah kolonial. Namun demikian dialog hasilnya menampakkan politik kolonial yang sangat konservatif dan reaksioner.⁸ Pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa perubahan-perubahan yang diminta hanya akan menambah atau memperbesar anggaran belanja saja, terlebih lagi pada masa-masa sulit seperti saat itu.

Dengan demikian nasionalisme tetap tumbuh terus, walaupun tidak diketahui secara pasti bagaimana harus diperjuangkan agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Perjuangan tersebut juga mengalami hambatan-hambatan yang berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya menindas terhadap kaum pergerakan. Dengan kebijakan itu diharapkan akan menjadi suatu senjata yang dapat mematikan perjuangan kaum pergerakan yang dianggap membahayakan keamanan negara.

Kaum pergerakan banyak yang pesimis dan frustrasi karena kebijakan-kebijakan Pemerintah yang sangat menindas tersebut. Perjuangan yang hendak berkonfrontasi dengan penguasa kolonial selalu menemui kegagalan, lebih-lebih yang berhaluan non kooperatif. Pers sebagai wadah komunikasi juga mengalami kesulitan dan kurang bebas me-

⁸Marwati Djoened P. (ed), Sejarah Nasional Indonesia V (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 86

nulis karena adanya pengawasan yang sangat ketat oleh Pemerintah kolonial dengan polisi-polisinya.

Krisis ekonomi bagaimanapun juga menyumbangkan alternatif atas perubahan haluan yang diambil oleh kaum pergerakan. Politik kolonial yang reaksioner dan krisis ekonomi banyak mendorong pemikiran untuk mengubah haluan perjuangan dari nonkooperatif menuju perjuangan yang berhaluan kooperatif sifatnya. Hal ini ditampilkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang tergabung dalam Pa-rindra atau yang lainnya. Dengan haluan yang baru mereka memperjuangkannya lewat Volksraad. Tentang hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikut ini.

B. Pergerakan Nasional Antara tahun 1930 - 1942

B.1. Sikap Pemerintah terhadap Pergerakan Nasional

Selama kurun waktu antara tahun 1931-1942, jabatan Gubernur Jendral di Hindia Belanda dipegang oleh de Jong yang memerintah tahun 1931-1936, dan Tjarda van Starckenborgh Stachouwer yang memerintah tahun 1936-1942. De Jong adalah sebagai figur seorang yang sangat kaku dan kolot. Politik kolonialnya ditujukan untuk mempertahankan 'rust en orde'. Cara yang ditempuhnya adalah dengan mengokohkan sendi-sendi tradisional dan daerah tanpa harus mengadakan reformasi dalam masyarakat. Seperti telah diuraikan terdahulu, bahwa perubahan hanya akan menambah anggaran belanja saja pada masa krisis ekonomi yang sedang melanda.

De Jong memanfaatkan alat represif yang sangat efisien yaitu PID (Politieke Inlichtingen Dienst).⁹ PID yang didirikan oleh van Limburg Stirum itu sebenarnya ditujukan untuk mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang akan digunakan sebagai dasar tindakan terhadap perkembangan yang ada, telah berubah fungsi menjadi lembaga yang lebih berfungsi sebagai penindasan atau tangan kanan Pemerintah yang bertugas menertibkan atau menindas gerakan-gerakan yang dianggap mengganggu 'rust en orde' nya Hindia Belanda.

Kebijakan-kebijakan yang diciptakannya antara lain berupa peraturan-peraturan yang akan menindas kaum pergerakan yang bicaranya dianggap membahayakan baik di dalam rapat-rapat maupun di dalam pers. Pemerintah juga akan menindas siapa saja yang menjadi penyebab atau yang memperluas aksi pemogokan kaum buruh, dan juga kepada siapa saja yang menimbulkan kegelisahan masyarakat. Sedangkan bentuk hukuman yang akan dikenakan atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenal dengan 'exorbitante rechten', yang mencakup bentuk externering, internering, dan verbaning.

Politik kolonial de Jong terkenal sebagai kolot dan kaku karena kebijakan-kebijakannya mengarah pada penindasan. Larangan berkumpul dan berapat, pembatasan terha-

⁹Onghokham, *op.cit.*, hal. 55

dap kemerdekaan pers, wewenang untuk menghentikan rapat-rapat jika terdengar kata-kata yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, dan penangkapan serta pembuangan adalah beberapa senjata dari gudang persenjataan yang diperbantukan kepada Gubernur Jenderal yang baru itu.¹⁰ Tentang larangan kepada seluruh pegawai pemerintahan Hindia Belanda yang menggabungkan diri dalam pergerakan ekstremis, juga ditekankan oleh de Jong.¹¹ Demikian pula terdapat larangan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang dianggap mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat.

Tindakan nyata dari kebijakan-kebijakan itu antara lain pembubaran rapat-rapat di Surabaya, Cilacap, Kebumen dan lain-lain. Pada tanggal 27 Juni 1933, Gubernur juga mengeluarkan peraturan yang melarang para pegawai negeri ikut serta menjadi keanggotaan Partindo. Juga terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh seperti Hatta, Syahrir, dan Soekarno pada bulan Februari 1934. Tindakan tindakan tersebut lebih banyak dilaksanakan oleh PID secara represif dengan alasan yang subyektif sekali sifatnya, tanpa dikemukakan secara terbuka bagaimana sebab yang sebenarnya. Bagaimanapun juga hal ini merupakan satu ciri kekakuan dari rezim kolonial di bawah pemerintahan de Jong.

¹⁰J.M. Pluvier, op.cit., hal. 53

¹¹Marwati Djoened P., op.cit., hal. 87

Akibat politik kolonial de Jong perkembangan pergerakan nasional mengalami krisis.¹² Pergerakan kebangsaan menjadi sepi dan terhambat pertumbuhannya, bahkan diantara beberapa pergerakan terpaksa membubarkan diri karena tidak mampu melawan tindakan pemerintah. Pembuangan tokoh-tokoh pergerakan menjadikan banyak kalangan pergerakan yang menjadi frustrasi. Keadaan ini lebih-lebih menimpa pergerakan yang menggunakan haluan non kooperatif seperti PNI dan Partindo yang akhirnya juga dibubarkan.

Dalam masa ini yang terjadi adalah proses pematangan nasionalisme dan rasa kesatuan serta tumbuh pertentangan berbagai golongan terhadap pemerintah kolonial Belanda.¹³ Dalam kondisi yang demikian, pemerintah kolonial menganggap pergerakan kebangsaan tidak akan tumbuh sehingga pemerintah mengabaikannya. Berbagai tuntutan yang diajukan oleh kaum pergerakan ditolak dengan tegas, sehingga semakin memperdalam jurang pemisah antara rakyat pada umumnya dan kaum pergerakan khususnya dengan pemerintah.

Rakyat pada umumnya sangat membenci politik reaksioner de Jong, dan berharap agar penggantinya nanti dapat memberikan angin segar bagi perjuangan pergerakan berikutnya. Dengan harapan tersebut banyak kalangan per-

¹²G. Moedjanto, Indonesia Abad ke 20, jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1988), hal. 57

¹³Onghokham, op.cit., hal. 63

gerakan yang tumbuh semangat barunya untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka lewat haluan kooperasi.

Pada bulan September 1936 de Jong digantikan oleh Tjarda van Starckenborgh Stachouwer yang kemudian memerintah sampai tahun 1942. Pemerintah di bawah Tjarda adalah pemerintahan yang kaku dan penuh keangkuhan juga.¹⁴ Harapan-harapan rakyat ke arah Indonesia merdeka sama sekali banyak yang diabaikan, bahkan ditindak dengan alasan yang dibuat-buat. Tjarda adalah seorang 'Binnenland Bestuur' sejati yang berpedoman bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, semua pegawai harus tetap bekerja sebaik-baiknya. Walaupun Tjarda adalah seorang figur yang sangat sopan, berpendidikan dan berintelegensing tinggi, tetapi ia ternyata merupakan orang yang hampir sama sikapnya dengan de Jong dalam menghadapi kaum pergerakan dengan berbagai macam perjuangannya. Perbedaan yang membedakannya adalah bahwa sikapnya lebih banyak ditentukan oleh pejabat-pejabat di luar dirinya, dan di lingkungan pemerintahan Hindia Belanda Tjarda tetap mempertahankan pegawai-pegawai lama dari masa de Jong. Para pegawai tersebut telah memiliki suatu etos kerja sebagaimana seperti yang mereka tetapkan pada saat pemerintahan de Jong. Dengan demikian tidak mengherankan apabila sikap Tjarda yang lebih banyak dipengaruhi oleh bawahannya, dianggap sama angkuhnya dengan sikap de Jong.

¹⁴Sagimun MD., Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 194

Tjarda juga terkenal sebagai seorang Gubernur Jenderal yang tidak mau tahu tentang kegentingan jaman atau saat dimana ancaman lawan sudah jelas akan menyerangnya. Dalam masa itu Tjarda tidak mau memberikan konsesi-konsesi apapun yang nyata terhadap tuntutan kaum pergerakan, misalnya terhadap petisi Sutarjo, tuntutan GAPI, moedi Wiwoho, dan lain-lain.

Sebetulnya kaum pergerakan telah memperlunak suara-suara tuntutan mereka (walaupun tujuannya dapat dikatakan sama), namun pemerintah tidak berubah juga sikapnya dan tetap menindas gerak-gerik perjuangan pergerakan nasional yang dianggap membahayakan. Cara yang ditempuh kaum pergerakan yang berhaluan kooperatif ditempuh karena dalam masa pemerintahan de Jong telah terjadi penangkapan-penangkapan dan pembuangan-pembuangan terhadap tokoh-tokoh pergerakan atau lebih sesuai disebut sebagai penindasan keras terhadap laju perkembangan pergerakan nasional. Dengan sikap kooperatif itu diharapkan pemerintah tidak merasa khawatir terhadap kaum pergerakan yang dapat membangkitkan masa aksi yang nantinya akan membahayakan otonominya di Indonesia. Memang benar bahwa taktik non kooperasi bisa menghebatkan masa aksi yang sebenarnya, yakni pergerakan masa yang berisikan radikalisme.¹⁵

¹⁵Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi (Djakarta: 1964), hal. 198

Pada tanggal 21 September 1939 GAPI mengeluarkan manifest yang terdiri dari dua hal, yaitu:¹⁶ pertama, mengajak kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam menghadapi fasisme dan militerisme Internasional baik yang dipelopori Jerman, Italia, dan Jepang: kedua, kerjasama itu akan dicapai jika diadakan parlemen yang anggotanya dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia. Demikian juga pada saat negeri Belanda jatuh ke tangan Jerman, pada tanggal 10 Mei 1940, berbagai rasa simpati kepada bangsa Belanda dan kesediaan untuk bekerjasama dapat muncul, sehingga usaha perang bersama dapat lebih ditingkatkan. Hal itu justeru menimbulkan anggapan bahwa usul Indonesia berparlemen terlalu tergesa-gesa dan akan dipikirkan sehabis perang nanti. Tanggapan Pemerintah yang demikian itu menjadikan kaum pergerakan merasa kecewa. Sikap konsevatif Belanda dengan politik pembekuan terhadap perkembangan politik justeru semakin menumbuhkan kesadaran akan solidaritas nasional dimana lebih tepat dikatakan sebagai pematangan nasionalisme. Demikian pula jurang pemisah antara rakyat dan kaum pergerakan pada umumnya dengan pemerintah Hindia Belanda jadi sangat dalam, dan banyak menimbulkan sikap apatis terhadap kejadian-kejadian yang akan melanda Hindia Belanda.

¹⁶Sagimun MD., op.cit., hal. 199

2. Perjuangan Pergerakan Nasional yang Menonjol tahun 1931-1942

Dalam kurun waktu 1931-1942 pergerakan nasional mempunyai corak yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Dengan pengaruh Sumpah Pemuda, organisasi-organisasi pergerakan nasional mengupayakan penyatuan pergerakan dalam suatu fusi tertentu. Dalam kurun waktu ini corak pergerakan dibedakan ke dalam dua periode yaitu antara tahun 1931 - 1935 dan periode antara tahun 1936 sampai 1942. Perbedaan ini terutama didasarkan atas pengaruh krisis ekonomi pengaruh penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan situasi politik dunia yang tengah terjadi.

Dalam kurun waktu tahun 1931-1935, pertumbuhan dan pergerakan nasional lebih lemah daripada masa-masa sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh menghebatnya krisis ekonomi dengan melemahnya ekonomi masyarakat terutama kaum buruh yang kemudian menganggur atau berkurang pendapatannya sehingga kesempatan untuk berpolitik lebih ditinggalkan. Demikian juga dengan sikap GG. de Jong yang menindas dan sangat reaksioner, membuat corak pergerakan nasional menjadi sangat lemah. Secara sepintas dalam kurun waktu 1931-1935, terdapat beberapa organisasi pergerakan nasional yang dapat dikatakan menonjol. Pergerakan itu antara lain PNI baru (Pendidikan Nasional Indonesia) yang lahir di Yogyakarta pada bulan Desember 1931 yang berhaluan nonkooperatif dalam mencapai tujuan pergerakan

annya. Partindo (Partai Indonesia) yang didirikan pada tanggal 30 April 1931 yang diketuai oleh Mr. Sartono, juga menggunakan taktik nonkooperasi. PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) merupakan perubahan nama dari Indonesische Studie Club yang telah terbuka bagi setiap orang di luar kelompok studi klub itu sendiri. Organisasi itu didirikan pada tanggal 4 Januari 1931 tetapi tidak mementingkan hal kooperatif maupun nonkooperatif karena hal itu hanya masalah taktik saja.¹⁷ Jika dilihat lebih jauh maka PBI bertendensi mempergunakan taktik nonkooperatif yang terbukti bahwa anggota-anggotanya yang duduk di dalam Volksraad bukanlah sebagai wakil dari organisasi ini, tetapi sebagai pribadi karena para tokohnya berpendapat bahwa duduk dalam dewan tersebut tidak ada gunanya. PBI pada tahun 1935 mengadakan fusi dengan Budi Utomo dengan nama baru yaitu Parindra (Partai Indonesia Raya).

Partai-partai yang menonjol di atas lebih menunjukkan penggunaan taktik nonkooperasi dalam mencapai tujuan Indonesia Merdeka. Berbagai aksi digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, namun perjuangannya banyak mengalami hambatan. Hambatan yang jelas datang dari pemerintah dengan pengawasan-pengawasan polisi yang sangat ketat dalam rapat-rapat yang diadakan, dan adanya larangan da-

¹⁷A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), hal. 121

ri pemerintah bahwa para pegawai pemerintah tidak boleh bergabung dalam organisasi pergerakan misalnya dalam organisasi pergerakan misalnya dalam Partindo. Demikian juga diadakan penangkapan dan pembuangan tokoh - tokoh pergerakan berdasarkan *exorbitante rechten* yang merupakan hak luar biasa dari Gubernur Jenderal.

Melihat penindasan-penindasan yang sangat keras dari pemerintah, maka organisasi-organisasi pergerakan dalam kurun waktu tahun 1936-1942 mengubah haluannya dari taktik nonkooperasi ke taktik yang kooperatif (walaupun masih ada yang menggunakan taktik nonkooperatif tetapi tidak begitu menonjol misalnya PSII). Dalam kurun waktu ini yang menjadi pemegang jabatan GG. adalah Tjarda van Starckenborgh sampai akhir kolonialisasi Belanda di Indonesia. Dengan taktik yang kooperatif pencapaian tujuan Indonesia Merdeka lebih diperlunak dan ditempuh dengan bekerjasama dengan pemerintah yang diperjuangkan lewat Dewan Rakyat. Walaupun tujuannya tetap Indonesia Merdeka, namun dalam perumusannya lebih diperlunak lagi, misalnya tujuan Partindo yaitu mencapai kemajuan ke arah suatu masyarakat dan bentuk negara yang tersusun menurut keinginan rakyat.

Pergerakan yang menggunakan haluan kooperatif antara lain Parindra yang berdiri pada bulan Desember tahun 1935 dengan tujuan Indonesia Raya. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam pergerakan ini antara lain Dr. Soetomo dan MH. Thamrin. Gerindo (Gerakan Indonesia) didirikan pada

tanggal 24 Mei 1937 juga menggunakan taktik kooperatif. Setelah keluarnya Partindo dari PPPKI (Permufakatan Partai-Partai Politik Kebangsaan Indonesia) yang kemudian berubah lagi menjadi Persatuan Partai Politik Kebangsaan Indonesia) maka pada tanggal 9 Pebruari 1935 partai ini menjadi lebih bersifat kooperatif.

Suatu fenomena baru setelah beberapa partai tampak pasif dan mengingot kegentingan nasional, dirasakan perlunya pemusatan tenaga bangsa Indonesia lahir dan batin. Hal inilah yang memunculkan terbentuknya GAPI yang bertujuan menyatukan semua partai politik Indonesia Raya.¹⁸ GAPI beranggotakan partai-partai politik yang ada sebelumnya antara lain Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII, dan PPKI. Perjuangan GAPI yang ingin mencapai Indonesia berparlemen akan memberikan sumbangan bagi Hindia Belanda dalam mempertahankan wilayah bila ada serangan dari Jepang yang diperkirakan sudah dekat waktunya. Sampai tahun 1940 GAPI menyiarkan suatu resolusi yang bermaksud mendesak pemerintah agar mengadakan perubahan dalam Dewan Rakyat dimana anggotanya dipilih berdasarkan pemilihan umum.

Dalam kurun waktu 1935-1942, sesuai dengan taktik kooperasi yang dijalankan terdapat beberapa usul perubahan sistem ketatanegaraan. Usul-usul tersebut didasarkan pada mulai bangkitnya kembali perekonomian akibat

¹⁸Ibid., hal. 145

krisis ekonomi yang menunjukkan adanya ancaman dari luar. Usul-usul perubahan tersebut diusulkan antara lain oleh Sutarjo Kartohadikusumo (PBI), MH. Thamrin (GAPI) dan Wiwoho Purbohadijoyo. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai ketua PPBB (Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputera) dan wakil Volksraad mengajukan suatu usul petisi kepada pemerintah Hindia Belanda yang lebih dikenal dengan petisi Sutarjo. Usul itu pada prinsipnya meminta kepada Pemerintah Hindia Belanda agar diselenggarakan konferensi kerajaan Belanda dimana dibahas status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yaitu status otonomi di dalam batas artikel 1 dari Undang-undang Dasar negara Belanda.¹⁹ Petisi itu diusulkan mengingat semakin meluasnya perasaan kecewa dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Jika usul petisi itu dikabulkan, ada harapan dapat mendorong semangat dan gelora rakyat untuk turut serta memikirkan pembangunan negeri, baik dalam segi ekonomis, sosial budaya, dan politik tanpa merugikan masing-masing pihak. Jika usul petisi itu tidak diterima, maka usaha saling pengertian antara keduanya menjadi tak ternilai lagi artinya.

Petisi tersebut mendapat dukungan dari Ratulangie, (Sulawesi/Kristen), Datuk Tumenggung (Sumatera/Islam), Alatas (Arab/Islam), Kasimo (Jawa/Katholik), dan Ko Kwat

¹⁹J.M. Pluvier, op.cit., hal. 135

Tiong (China/Budha). Namun demikian ada juga pihak yang tidak setuju terhadap cara pengajuan petisi tersebut yang dengan meminta-minta kepada pemerintah. Vanderlands Club dengan tegas menyatakan bahwa petisi itu terlalu tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan situasi dimana diperkirakan Hindia Belanda belum cukup berkembang untuk mandiri baik secara politis maupun ekonomis. Di dalam Dewan Rakyat sendiri setelah diadakan pemungutan suara, menghasilkan suara 26 menyetujui, dan 20 melawan. Dengan demikian petisi tersebut akan dilanjutkan untuk diusulkan dalam Dewan Perwakilan di Belanda.

Untuk memperjuangkan agar petisi tersebut diterima, muncul berbagai macam dukungan baik yang dari Negeri Belanda sendiri oleh Perhimpunan Indonesia maupun di Indonesia dibentuk CCPS (Central Committee Petisi Sutardjo) pada bulan Oktober 1937 beserta cabang-cabangnya di berbagai daerah. Disamping di kalangan pergerakan nasional sendiri ada yang menunjukkan sikap negatif terhadap petisi tersebut, diantaranya Parindra yang tidak setuju atas petisi itu, tetapi hanya menyokong diadakan konferensi dari wakil-wakil Indonesia dan Belanda, juga PSII yang menuduh gerakan yang dijalankannya sebagai gerakan yang naif.²⁰

²⁰Marwati Djoened P., op.cit., hal. 227

Setelah mengalami perjuangan yang panjang, akhirnya petisi tersebut ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda. Alasan penolakannya adalah bahwa perkembangan politik di Indonesia belum mantap dan diragukan apakah rakyat Indonesia sudah siap mengingat tuntutan ekonomi dipandang sebagai hal yang tidak wajar karena pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik yang belum memadai. Dengan demikian kandaslah usul petisi tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda, lebih-lebih oleh G.G. Tjarda van Starckenborgh-Stachouwer. Namun demikian perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka tetap diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pergerakan lainnya.

Dalam bulan Mei 1939, suatu federasi baru yang diikuti oleh kebanyakan partai nasionalis, GAPI (Gabungan Politik Indonesia) didirikan, lantas disusul oleh diciptakannya sebuah front kesatuan yang bahkan lebih ambisius dari kekuatan-kekuatan politik Indonesia yang terjadi tujuh bulan kemudian.²¹ GAPI pada prinsipnya ingin menyatakan pendapat antar kelompok untuk menentukan nasib sendiri bagi Indonesia, kesatuan nasional didasarkan pada politik, ekonomi, sosial budaya, memperjuangkan suatu pemilihan umum secara demokratis untuk memilih parlemen yang bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia, dan ingin

²¹Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, terjemahan (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal. 127

membentuk solidaritas antara kelompok-kelompok Indonesia dan Belanda dalam rangka memelihara suatu front kekuatan anti fascis.²² Walaupun GAPI terbentuk dari berbagai partai, tetapi otonomi tiap partai tetap diberikan untuk melaksanakan programnya masing-masing dan GAPI antar partai akan dapat tercapai secara bersama-sama oleh masing-masing partai.

Pada saat negeri Polandia jatuh ke tangan Jerman, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang mengajak rakyat Indonesia dan negara Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fascisme. Kerjasama itu akan lebih berhasil jika rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam pemerintahan, yang berupa satu pemerintahan yang betul-betul bertanggung jawab pada parlemen yang telah dipilih secara demokratis. Secara intern GAPI juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar ikut menokong perjuangan GAPI tersebut.

Untuk memperjuangkan aksi GAPI, dibentuk kongres rakyat Indonesia pada tanggal 25 Desember 1939. Kongres tersebut bertujuan mencapai Indonesia raya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempurnaan cita-citanya. Dalam kongres pada tanggal 25 Desember 1939 juga ditetapkan bendera merah putih sebagai bendera persatuan dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan Indonesia. Perjuangannya juga dilakukan dengan pembentukan ko-

²²George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (London: Oxford University Press, 1952), hal. 97

mite Parlemen Indonesia di beberapa wilayah. Harapan yang ingin dicapai adalah bahwa para tokoh di daerah dapat meyakinkan rakyat untuk sama-sama berjuang mewujudkan cita-cita bangsa.

Setelah mengalami perjuangan yang panjang dan berbagai cara, akhirnya tuntutan Indonesia Berparlemen itu ditolak. Jawaban dari pemerintah menyatakan bahwa sudah sewajarnya jika menurut perkembangan masyarakat akan muncul kecakapan dan kegairahan masyarakat untuk memegang peranan dalam kerangka kelembagaan politik. Walaupun demikian, selama status politik masih berlaku, semua tanggung jawab ketatanegaraan tetap ada pada pemerintah Belanda. Penolakan ini banyak menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat dan GAPI sendiri. Pemerintah Hindia Belanda selalu ingin tetap mempertahankan status quonya di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah beranggapan bahwa sedikit saja konsesi yang diberikan kepada bangsa Indonesia, justru akan sangat membahayakan kedudukannya. Dengan demikian pemerintah berusaha membuat alasan-alasan untuk menolak segala aksi yang dianggap akan membahayakan pemerintah. Dalam situasi yang seharusnya sudah perlu dibentuk suatu hubungan kerjasama yang akan menguntungkan pertahanan Hindia Belanda-pun, pemerintah tetap tidak memberikan konsesi. Hal ini hanya akan menimbulkan suatu apatisme di kalangan rakyat karena diskriminasi ras tetap dipertahankan, sehingga hal ini juga akan memperlemah sumbangan rakyat dalam mempertahankan wilayah

dari serangan negeri asing.

Dengan penolakan usul GAPI di atas, tidak berarti perjuangan mencapai Indonesia Merdeka berhenti sampai di situ saja. Dari kelompok kooperatif tetap ada upaya untuk memperjuangkan cita-cita itu lewat Dewan Rakyat. Pada saat perang Dunia II pecah sudah saatnya pemerintah Hindia Belanda menggalang kerjasama yang betul - betul nyata dengan bangsa Indonesia. Untuk itu Wiwoho Purbohadijoyo sebagai seorang anggota Volksraad mengajukan suatu mosi.²³

Mosi Wiwoho sebenarnya hanya mengungkapkan kembali petisi Sutarjo dan mosi-mosi sebelumnya. Pada dasarnya mosi Wiwoho menyatakan kemauannya untuk menyelesaikan masalah ketatanegaraan Hindia Belanda menurut konstitusi tahun 1922 yang memungkinkan pemberian kemerdekaan Indonesia dalam perhubungan kerajaan dalam waktu lima tahun. Hal itu mencakup juga pengembangan Dewan Rakyat sebagai lembaga demokratis yang bertanggung jawab kepada rakyat. Mosi tersebut juga menuntut agar istilah Hindia Belanda diganti dengan Indonesia dan Inlander dengan Bangsa Indonesia.²⁴

Mosi itu ditanggapi pemerintah dengan penolakan juga. Pemerintah tidak menyetujui usul tersebut karena dianggap tidak sesuai waktunya untuk melakukannya. Walau-

²³G. Moedjanto, op.cit., hal. 64

²⁴G. Moedjanto, op.cit., hal. 65.

pun demikian untuk mengantisipasi agar kekecewaan bangsa Indonesia tidak terlalu berdampak negatif, pemerintah membentuk suatu panitia penyelidikan. Tugas panitia yang lebih dikenal dengan Komisi Visman itu adalah mengkaji dan mengungkapkan keinginan, cita-cita, dan harapan politik yang hidup di kalangan masyarakat. Kesimpulan sementara yang diperolehnya adalah bahwa rakyat pada umumnya puas dengan pemerintahan Belanda. Sebelum melakukan penyelidikan-penyelidikan selanjutnya secara terperinci, Hindia Belanda sudah terdesak terlibat dalam peperangan melawan Jepang, sehingga tugas panitia tidak bisa dijalankan lebih lanjut.

Dengan demikian jika dilihat dari mosi-mosi dan usul-usul dari pergerakan nasional di atas, dapat disimpulkan tidak pernah menghasilkan kesepakatan berarti. Hal tersebut selalu disebabkan oleh sikap pemerintah Hindia Belanda yang selalu kaku dan selalu terjadi kece- masan bahwa bila sedikitpun konsesi yang akan diberikan kepada bangsa Indonesia justru akan menjadi bumerang ba- gi keberadaannya. Jika mengingat situasi dunia pada umumnya yang sudah sangat genting, maka segala upaya untuk mencegah agar tidak terjadi gejolak dalam masyara- kat pemerintah harus berlaku menindas berbagai aksi dari kalangan pergerakan nasional.

C. Kebijakan Hindia Belanda Menghadapi Perang Melawan Jepang

Pada masa-masa akhir kolonialisme Belanda di Indonesia, disamping kurang mendapatkan dukungan politis dari bangsa Indonesia, dalam bidang pertahanan dan keamanan tidak berhasil menciptakan suatu pasukan pertahanan yang mampu mempertahankan wilayah koloni dari ekspansi asing. Walaupun demikian pemerintah Hindia Belanda telah berupaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan wilayah Hindia Belanda. Kebijakan itu berkaitan dengan perkembangan situasi dunia yang semakin memanas akibat perilaku dari negara-negara fasis yang menampakkan hasratnya untuk menguasai dunia.

Menjelang meletusnya Perang Dunia II, Hindia Belanda merasa bahwa kekuatan angkatan perangnya belum memadai untuk berperang yang sebenarnya. Hal ini mencakup kekurangan dari segi jumlah personel militer dan juga ketrampilan dalam berperang, serta keterbatasan dalam jumlah dan jenis-jenis peralatan militer yang ada. Tentang personel militer, sebetulnya pada masa Perang Dunia I sudah pernah diusulkan dari kalangan pergerakan nasional untuk diadakan milisi bumi putera, tetapi saat itu ditolak oleh pemerintah sendiri. Akhirnya menjelang Perang Dunia II hal itu dirasakan oleh pemerintah akan perlunya tenaga sukarela untuk membantu angkatan perang Hindia Belanda dalam perang melawan Jepang nantinya. Demikian juga untuk peralatan militer dirasakan oleh Hin-

dia Belanda bahwa peralatan yang ada kurang memenuhi syarat lagi untuk berperang melawan musuh yang dari segi peralatannya sudah dapat dikatakan modern karena didukung adanya industri yang kuat.

Kebijakan yang dirasakan sebagai persiapan pertahanan antara lain muncul dengan diadakannya atau dikeluarkan 'Defensie Grondslagen' sebagai dasar-dasar pertahanan wilayah Hindia Belanda. Pokok-pokoknya antara lain²⁵: dikemukakan bahwa angkatan perang Hindia Belanda bertugas untuk mempertahankan diri dari ancaman luar di samping tetap memegang teguh prinsip kenetralan jika terjadi peperangan, akan diadakan pembagian tugas antara kekuatan darat dan kekuatan di laut, dimana kekuatan daratnya lebih bertugas secara intern di Jawa dengan bantuan kekuatan udara, dan kekuatan udara juga membantu kekuatan di laut dalam mempertahankan wilayah - wilayah strategis di luar Jawa, jika terjadi peperangan angkatan perang Hindia Belanda harus mempertahankan wilayahnya sambil menunggu bantuan dari luar, tentang pelaksanaan kebijakan itu akan disesuaikan dengan keadaan ekonomis dan militer Hindia Belanda. Pada akhirnya pelaksanaan dari paket Defensie Grondslagen tersebut menemui hambatan secara finansial karena menjangkitnya krisis ekonomi, dengan politik penghematan lebih ditekankan dan tenaga-tenaga militer lebih dialokasikan untuk tugas-tugas kepo-

²⁵Djajusman, op.cit., hal. 20

lisian.

Setelah krisis ekonomi mulai reda dan kondisi per-ekonomian membaik, timbul pemikiran untuk memperluas material atau peralatan militer Hindia Belanda dengan memotorisasikan alat yang sudah ada, disamping pemesanan peralatan perang dari luar. Salah satu contohnya pemesanan mobil-mobil lapis baja dari Swedia. Banyak sarana-sarana dibangun, misalnya bangunan-bangunan untuk tangsi-tangsi militer. Kekuatan udara juga dipersenjatai dan memunculkan suatu korps Angkatan Udara tersendiri yang lebih dikenal dengan nama 'Militaire Luchtvaart' (Angkatan Udara)²⁶. Walaupun pemesanan peralatan perang telah dilaksanakan, namun memenuhi banyak hambatan. Hambatan itu lebih disebabkan oleh situasi dunia dimana telah terjadi ketegangan-ketegangan antar negara yang saling berlawanan. Negara produsen lebih memprioritaskan kebutuhan pertahanan untuk negaranya sendiri terlebih dahulu. Disamping itu juga terjadi pencegatan terhadap kapal-kapal yang mengangkut pesanan alat-alat perang ke Hindia Belanda, misalnya terjadi penenggelaman tiga buah kapal oleh Jerman yang membawa peralatan perang ke Hindia Belanda. Hambatan itu juga muncul karena beberapa negara di Eropa sudah terlibat dalam kancah Perang Dunia II, sehingga pemesanan peralatan tersebut tidak pernah sampai ke Hindia Belanda, atau jika sampai ke Hindia Be-

²⁶Djajusman, op.cit., hal. 28

landa, sudah dapat dikatakan terlambat kedatangannya.

Pada tahun 1930-an dibentuk suatu dewan mobilisasi yang bertugas melakukan persiapan-persiapan pengadaan mobilisasi total dan besar-besaran jika terjadi peperangan. Dewan ini juga mengadakan pemikiran - pemikiran dan saran-saran kepada pemerintah agar dapat menggunakan man power seefisien mungkin. Dewan itu juga memikirkan tentang pembangunan industri-industri persenjataan yang dilakukan dengan jalan membangun pabrik-pabrik senjata baru, atau mengubah pabrik-pabrik yang telah ada menjadi suatu pabrik yang memproduksi peralatan perang modern. Mengingat semakin dekatnya ancaman perang, maka modernisasi industri perang tidak akan sempurna dengan waktu yang hanya beberapa saat lagi. Dengan demikian banyak saran-saran dewan yang terpaksa tidak bisa memperoleh hasil maksimal. Hal ini bukan berarti bahwa kontribusi - Dewan Mobilisasi tidak ada sama sekali terhadap sejarah pertahanan Angkatan Perang Hindia Belanda. Pada saat negara Belanda jatuh ke tangan Jerman tanggal 10 Mei 1940, Gubernur Jenderal menyatakan Hindia Belanda dalam keadaan darurat. Pada saat itu juga di Hindia Belanda dibentuk beberapa kesatuan keamanan, antara lain:²⁷

1. Stadswacht (pengawal kota), bertugas menjaga dan melindungi daerah perkotaan dan pusat-pusat pemerintahan.

²⁷Djajusman, *ibid.*, hal. 28

2. Landwacht (pengawal negeri), bertugas menjaga dan membantu tugas-tugas dalam perkebunan;
3. Vrijwillige Oefenkorpsen (korps latihan sukarela) bertugas menjaga obyek-obyek penting dan vital seperti perlistrikan dan lain-lain.
4. Vaubec (Vrijwillige Automobil Corps) yang bertugas memenuhi kebutuhan sopir secara sukarela.
5. VAC (Vrouwelijk Automobil Corps) bertugas memenuhi kebutuhan sopir-sopir dalam dinas-dinas tentara dan marinir, serta membantu transportasi Stadwacht dan Landwacht.
6. CORO (Corps Opleiding Reserve Officiern), yaitu kops pendidikan opsir cadangan yang bertugas memenuhi kebutuhan perwira-perwira cadangan.
7. KMA (Koninklijke Militaire Academy) di Bandung sebagai perluasan pendidikan militer dari kalangan Bangsa Belanda diperluas untuk Bangsa Indonesia.

Lebih jauh tentang milisi pribumi, dimulai tahun 1941 dimana dinas wajib militer diperluas untuk orang-orang Indonesia juga. Akhirnya milisi yang diusulkan itu terlampau kecil (5.000 - 6.000 orang).²⁸ Mengingat milisi ini baru diperluas setelah insyaf akan ancaman Jepang, maka kualitas personil kurang memadai. Dari segi profesionalitas korps dirasakan tidak akan memenuhi sya-

²⁸J.M. Pluvier, op.cit., hal. 211

rat baik dari segi etos maupun ketrampilannya. Dengan demikian maka milisi pribumi tidak bisa menghasilkan suatu korporasi militer yang militan, dan apakah mereka mampu melaksanakan tugas sebagai militer di tengah peperangan atau tidak, akan dilihat pada peperangan nantinya.

Kebijakan yang menyangkut rencana strategi perang antara lain dilakukan dengan penempatan militer pada wilayah-wilayah strategis di Hindia Belanda. Wilayah-wilayah itu misalnya Pantai Utara Jawa yang membentang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, wilayah-wilayah ekonomis seperti kawasan industri dan perkebunan. Untuk angkatan laut dikerahkan menjaga pintu di utara wilayah Hindia Belanda (Selat Malaka). Mereka ditugaskan untuk melakukan perlawanan dan melakukan penghambatan - penghambatan setiap musuh yang menyerang. Kemungkinan tempat - tempat pendaratan tentara Jepang dijaga dan diperkuat oleh Militaire Luchtvaart. Pembangunan beberapa landasan udara juga dengan segera mungkin disebarluaskan. Masih banyak rencana-rencana yang muncul pada masa menjelang dimulainya peperangan melawan Jepang.

Demikianlah kondisi politik ekonomi Hindia Belanda, yang mewarnai kehidupan sebelum serbuan Jepang tiba. Keadaan yang kurang menguntungkan seperti diuraikan dalam bagian di atas berakibat memperlemah dan mempersulit suatu pertahanan Hindia Belanda dalam peperangan melawan Jepang nantinya. Untuk bisa menilai yang sebenarnya ten-

tanggakesiapan fisik maupun psikis Hindia Belanda dalam perang melawan Jepang, akan dilihat juga bagaimana kondisi Jepang sampai pelaksanaan perang itu sendiri dalam uraian selanjutnya.



BAB III

NAFSU FASISME JEPANG TERHADAP INDONESIA

A. Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Istilah Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya memiliki dua arti yang saling berlawanan. Pengertian pertama menunjukkan maksud Jepang untuk membebaskan bangsa Asia dari cengkeraman penjajah Barat yang secara leluasa bertindak di wilayah koloninya masing-masing. Setelah pembebasan dari penjajah Barat akan dibentuk suatu lingkungan yang makmur bagi setiap bangsa di Asia dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga besar yang terdiri dari negara-negara di seluruh Asia yang termasuk jajahan negara-negara Barat.

Dilihat dari yang sebenarnya, tampak bahwa istilah tersebut digunakan Jepang sebagai kedok dan propaganda untuk memperoleh legitimasi bagi perjuangannya merebut wilayah Asia Timur khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya, untuk kemudian dikuasai. Dalam hal ini, istilah tersebut digunakan agar bangsa-bangsa di Asia mau membantu Jepang dalam menghancurkan kedudukan bangsa-bangsa Barat yang telah lama bercokol di Asia, tanpa menimbulkan kecurigaan terhadap maksud Jepang yang sebenarnya. Dengan demikian dua pengertian istilah Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya itu menjadi kontradiktif antara maksud yang dicanangkan Jepang dengan maksud yang

sebenarnya.

Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya terdapat secara helas dalam memorandum Tanaka. Tanaka adalah nama pencetusnya, dimana pada abad 20 merupakan tokoh penting Jepang yang memujikan dilakukannya ekspansi kolonial dan dijalankannya politik militer yang kuat.²⁹ Memorandum Tanaka merupakan sebuah dokumen rahasia yang berisikan tentang rencana politik dalam rangka meluaskan ekspansi kolonial Jepang ke negeri-negeri seberang guna mendirikan sebuah negara atau kerajaan besar di Asia dimana Jepang sebagai pemimpinnya.

Jepang mempunyai rencana demikian sehubungan dengan latar belakang politik ekonominya dimana pada sekitar tahun 1927 timbul krisis bank di Jepang yang lebih dulu timbul sebelum terjadinya depresi tahun 1929. Saat tersebut yang menjabat Perdana Menteri adalah Jenderal Baron Tanaka Giichi. Terjadinya depresi umum di Jepang menyebabkan banyak negeri importir melakukan proteksi, sehingga perdagangan luar negeri Jepang menjadi terhambat.

Disamping faktor ekonomi, juga terdapat faktor sosial terhadap penyebab dicahangkannya rencana tersebut. Faktor sosial ini dirasakan dengan adanya penambahan penduduk yang sangat besar saat itu yang mencapai satu juta jiwa per tahun. Penduduk Jepang saat itu kira-kira

²⁹Nio Joe Lan, Djepang Sepanjang Masa (Djakarta: PT. Kinta, 1962), hal. 253

sudah berjumlah 60 juta jiwa, jelas membutuhkan ruang gerak yang lebih luas. Ruang gerak yang dimaksud itu digunakan juga sebagai pasar-pasar baru bagi hasil industrinya dan sebagai tempat disediakannya bahan mentah. Alternatif yang ada terdapat di luar negeri Jepang, terutama wilayah Tiongkok dan wilayah-wilayah di sekitar Asia.

Untuk memecahkan masalah dalam negeri Jepang tersebut banyak pembesar Jepang (termasuk Tanaka) mengemukakan bahwa Jepang harus melakukan ekspansi ke luar wilayah Jepang dengan menjalankan politik militer yang kuat. Pernyataan itu muncul dalam kurun waktu 1927-1929 disaat Tanaka menjabat sebagai Perdana Menteri. Memorandum Tanaka konsisten dengan ajaran Hakko Ichiu yang secara bebas dapat diartikan bahwa Jepang akan menyatukan bangsa-bangsa sedunia dalam sebuah kerajaan besar dimana Jepang sebagai pemimpinnya. Jepang sebagai bangsa yang telah maju mempunyai kewajiban untuk mempersatukan bangsa-bangsa di dunia dan memajukannya.³⁰

Tujuan adanya Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya juga bisa dikatakan sebagai tujuan yang kontradiktif sifatnya antara tujuan yang diinginkan dengan tujuan yang sebenarnya. Maksud Jepang untuk menyatukan bangsa-bangsa di Asia Timur dan bersama-sama menentang untuk

³⁰G. Moedjanto, *op.cit.*, hal. 66. Lihat juga Dja-jusman, *op.cit.*, hal. 6

kemudian mengusir para penjajah Barat yang telah bercokol di Asia tidak sesuai dengan kenyataannya. Jepang ternyata bernafsu untuk menguasai wilayah-wilayah di Asia Timur dalam rangka mengeruk kekayaan alamnya dan sebagai wilayah baru bagi pemasaran hasil industrinya. Dengan menggunakan kedok yang demikian itu, Jepang berharap bahwa bangsa-bangsa Asia Timur dan Tenggara dapat dibujuk untuk selanjutnya berpihak pada Jepang dan sebagai bangsa yang secara etnis lebih serupa daripada Bangsa Barat yang bercokol di Asia Timur dan Asia Tenggara. Walaupun demikian taktik tersebut pada masa awal pelaksanaannya banyak mendapat tempat di hati penduduk yang pada saat itu sedang berada di bawah kolonialisme Barat.

Tujuan lain yang dicanangkannya adalah sebagaimana dicita-citakan kaum militeris Jepang untuk membebaskan saudara-saudaranya yang berada di Tiongkok, India, Filipina, Indonesia, Malaya, dan sebagainya. Hal itu terlihat dan terbukti pada saat dilancarkan penyerbuan terhadap Manchuria pada tahun 1931.

Jepang berani memaklumkan Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya karena terdapat beberapa landasan yang mendasarinya. Dasar pertama adalah bahwa Bangsa Jepang merasa sebagai bangsa yang paling maju di lingkungan Asia Timur, dan merasa memiliki kewajiban untuk memajukan bangsa-bangsa lainnya. Sejak dilakukannya suatu Restorasi Meiji, Jepang maju pesat dalam industri dan perekonomiannya. Adanya perkembangan yang demikian itu

menuntut tersedianya pasar-pasar baru bagi hasil industrinya serta bahan baku yang dibutuhkan bagi industri-industri yang ada.

Dasar yang lain adalah bahwa Jepang dan bangsa-bangsa Asia merupakan kelompok bangsa timur yang kebanyakan sedang berada di bawah penjajahan Barat. Di samping maksud yang tersembunyi untuk menguasai wilayah Asia Timur, Jepang mengharapkan adanya bantuan dari bangsa setempat untuk memerangi bangsa-bangsa barat yang berada di situ. Hal ini terutama tampak dalam daya perang Jepang yang belum mencukupi untuk melakukan peperangan selama suatu pemusatan tenaga persekutuan antara rakyat negara-negara penjajah dengan yang dijajah.

Kekuatan-kekuatan lawan Jepang yang ada di Asia Timur pada saat itu antara lain Amerika dan Inggris. Kekuatan Amerika berpusat di Pasifik dan Filipina. Kepentingan Amerika di Asia sudah tertanam sejak lama dalam rangka menguasai sumber-sumber bahan mentah dan sebagai pangkalan militer dalam rangka ekspansi kolonial yang di tujukan di wilayah-wilayah Asia. Kekuatan Inggris sudah mendarah daging terutama di Malaya dan Singapura. Bagaimanapun juga kekuatan Inggris tidak dapat diremehkan terutama untuk angkatan lautnya. Hal inilah yang mendorong Jepang harus bekerjasama dengan rakyat yang terjajah di Asia, untuk bersama-sama mengusir penjajah Barat.

Untuk dapat mengetahui pencapaian Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya perlu dilihat faktor-faktor

penghambat dan pendukungnya. Faktor pendukung keberhasilan itu di antaranya adalah kemajuan industri Jepang yang lebih pesat di Kalangan Asia Timur. Sejak adanya restorasi Meiji Jepang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah negeri yang maju pesat dalam perindustrian. Kemajuan itu berakibat pula terhadap perkembangan industri persenjataan. Hal inilah yang akan mendukung kekuatan militer Jepang dalam melaksanakan ekspansi militer.

Faktor pendukung yang lain adalah wilayah geografis Jepang dan Asia Timur yang bersebelahan dan bertetangga. Hal ini akan lebih mudah dijadikan sebagai alasan Jepang akan menyatukan dan memajukan semua bangsa Asia di bawah atap kerajaan Jepang. Berbagai cara diupayakan untuk mempengaruhi sikap bangsa-bangsa Asia agar bersimpati pada Jepang khususnya dalam mencapai cita-cita Jepang seperti telah dikemukakan di atas. Dilihat dari faktor intern Jepang sendiri terlihat adanya kesan akan keunggulan bangsa kulit berwarna atas bangsa kulit putih (dalam hal ini dibuktikan dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905). Kemenangan Jepang atas Rusia tersebut banyak berpengaruh terhadap perasaan rasialis yang pada intinya anti ras Barat. Kejayaan itu ditunjukkan oleh kuatnya etnis militer Jepang yang banyak disebut - sebut sebagai militer yang profesional.

Di balik beberapa faktor pendukung itu terdapat pula faktor-faktor yang menghambat pencapaian cita-cita tersebut. Faktor pertama, adalah bahwa di Pasifik dan

Asia Tenggara telah bercokol beberapa negara kolonialis Barat yang telah kuat, misalnya Amerika yang telah memiliki kepentingan ekonomis dan militer di Filipina dan Pasifik. Pada waktu selanjutnya banyak pemimpin-pemimpin nasionalis yang menangkap begitu jauh apa tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh Jepang. Sebagai contoh pada saat Jepang berusaha masuk ke Manchuria, di sana nasionalisme kemudian bangkit untuk menentang kehadiran Jepang di bawah Chiang Kai Shek. Sebenarnya pemerintah nasional Chiang Kai Shek juga baru berusaha memperoleh kembali penguasaan atas Manchuria yang kini benar-benar kukuh dalam cengkeraman ekonomi Jepang. Bangsa Indonesia juga demikian, dimana Soekarno dibebaskan dari penjara di Padang oleh Jepang, tetapi justru Soekarno kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melawan Jepang dalam mencapai Indonesia Merdeka.

Pada dasarnya rencana-rencana Jepang tersebut cukup prospektif jika landasan yang kokoh dapat diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Namun karena berbagai hambatan maka rencana itupun akhirnya runtuh pada masa menjelang akhir dari Perang Dunia II. Kehancuran itu terutama terjadi setelah keadaan perang berbalik dimana Amerika Serikat hancur di Pearl Harbour kemudian menyusun kekuatan lagi dan melakukan pembalasan dengan menjatuhkan bom atom di atas Nagasaki dan Hiroshima. Dengan demikian Amerika sekaligus juga berhasil membuyarkan impian Jepang untuk merealisasikan Hakko Ichiu-nya.

Untuk melihat bagaimana Jepang berusaha mencapai cita-cita Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, harus dilihat perang Jepang melawan kolonialis Barat di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Mengingat dalam skripsi ini hanya menyangkut batasan wilayah di Indonesia, maka lebih ditekankan melihat perang Jepang melawan Hindia Belanda. Pada dasarnya penaklukan Indonesia oleh Jepang hanya berjalan dalam waktu yang sangat singkat. Ketertarikan Jepang terhadap Indonesia sebenarnya didasarkan juga oleh nafsunya untuk menguasai kekayaan atau sumber alam dan daya tarik lainnya seperti akan diuraikan dalam bagian di bawah ini.

B. Rencana Jepang Terhadap Wilayah Indonesia

1. Sebab-sebab Wilayah Indonesia termasuk dalam rencana militer Jepang

Rencana Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang dimakmumkan Jepang membuat suatu alternatif bahwa bangsa Asia yang banyak memiliki berbagai macam kekayaan sumber alam diharapkan dapat dikuasai secara ekonomis oleh Jepang. Penguasaan itu tidak mungkin hanya secara ekonomis saja tanpa harus menguasai secara politis. Dengan menguasai secara politis maka kepentingan ekonomisnya akan tetap terjamin.

Adanya kolonialisasi bangsa-bangsa Barat di Asia merupakan suatu faktor penghambat Jepang untuk berbuat

secara leluasa di Asia Timur dan Asia Tenggara. Amerika yang kekuatan militernya di Asia patut diperhitungkan juga dalam hubungannya antar negara Barat yang memiliki wilayah koloni di Asia, juga harus menjadi perhatian tersendiri bagi Jepang. Sebagaimana Jepang mempunyai rencana terhadap Manchuria dan sekitarnya, Jepang harus mulai menyingkirkan kekuatan-kekuatan Barat yang ada di Asia.

Wilayah Indonesia juga tak luput dari incaran Jepang disebabkan oleh adanya daya tarik Indonesia buat Jepang. Daya tarik yang dimaksud itu terdiri dari beberapa hal yang sangat dibutuhkan Jepang yang selaras dengan perkembangan dalam negeri Jepang dalam bidang perindustrian. Di samping itu bagi Indonesia ajaran Hakko Ichiu yang merupakan landasan ideologis pelaksanaan ekspansinya dilihat sebagai maksud Jepang agar tidak menimbulkan pertentangan terhadap Jepang dalam melakukan ekspansinya. Jadi Indonesia juga merupakan sasaran perluasan ajaran Hakko Ichiu yang diperkuat oleh keterangan para antropolog Jepang sekitar tahun 1930 yang menyatakan bahwa Bangsa Jepang dan Indonesia itu serumpun.³¹

Dilihat dari maksud sebenarnya, dapat diungkapkan bahwa Jepang mempunyai kepentingan sosial dan ekonomis terhadap Indonesia. Salah satu kepentingan yang paling

³¹G. Moedjanto, op.cit., hal. 66

penting bagi Jepang adalah bahwa Indonesia menyediakan kekayaan alam berupa minyak. Dulu Jepang sebagai importir minyak terbesar dari Amerika, akan tetapi karena terjadi hubungan yang buruk dengan Amerika maka perhatian untuk mendapatkan minyak itu diarahkan ke Indonesia. Import minyak Jepang sebelum tahun 1939 berkisar 23 juta barel dari luar negeri. Hal ini disebabkan juga karena Jepang sendiri hanya menghasilkan kurang lebih 17 juta barel. Dengan embargo minyak dari Amerika terhadap Jepang, maka satu-satunya alternatif adalah menguasai Hindia Belanda. Di samping itu Hindia Belanda juga sebagai penghasil karet yang banyak berguna bagi bahan - bahan mentah perindustrian Jepang.

2. Garis besar rencana Jepang di Asia Tenggara

Untuk mencapai kejayaan dalam perang yang akan dilakukan, Jepang menyusun rencana dan strategi militer yang bagus. Rencana itu mencakup segala penyelesaian apabila ada kemungkinan-kemungkinan perlawanan dari negara-negara Barat. Garis besar rencana itu adalah sebagai berikut:³²

- a. Pearl Harbour dihancurkan untuk membebaskan ikut sertanya Amerika dalam penaklukan Asia Tenggara.
- b. Merebut Singapura yang digunakan sebagai pangkalan AL Inggris, untuk kelancaran pelaksanaan operasi selanjutnya di Asia dan Pasifik;

³²Djajusman, op.cit., hal. 63-70.

- c. Operasi dilanjutkan ke Filipina untuk menghancurkan pertahanan Amerika di wilayah itu, yang kemudian akan dijadikan pangkalan AL dan AU Jepang untuk melancarkan ofensi terhadap wilayah-wilayah di sebelah selatannya;
- d. Merebut Indo China, Siam, dan Birma dengan tujuan menguasai hasil padi Birma dan mencegah suplai peralatan perang Amerika ke Tiongkok lewat jalur darat Birma;
- e. Hindia Belanda sebagai penghasil minyak dan karet harus direbut, karena kedua hasil dari Hindia Belanda itu dibutuhkan untuk industri perang Jepang;
- f. Merebut Australia sebagai kemungkinan tempat pelarian dan basis baru bagi Amerika Serikat;
- g. Jepang akan merebut kepulauan Aleuten untuk membebaskan serangan udara Amerika Serikat dan sekaligus memutuskan hubungan Amerika dan Rusia.

Jadi secara ringkas Jepang akan meletakkan dasar-dasar pertahanan yang kuat dulu dengan menetralsir kekuatan musuh di Asia Pasifik. Setelah diperkirakan kuat penguasaan dilanjutkan ke wilayah-wilayah strategis yang sekaligus merupakan penghasil barang-barang tambang bagi kepentingan industrinya.

Wilayah-wilayah Hindia Belanda yang akan direbut Jepang dalam rencana militernya, mencakup daerah-daerah penghasil minyak terutama Tarakan dan Balikpapan, peng-

hasil karet terutama Sumatera. Tujuan terakhir serangannya akan ditujukan untuk menguasai laut Jawa yang kemudian akan merebut Jawa sebagai kekuatan pertahanan Hindia Belanda. Akan tetapi sebelum merebut Jawa juga akan dibuat jalur serangan yang berbasis di Sulawesi dan Irian untuk meletakkan dasar bagi serangan berikutnya.

Jepang beranggapan bahwa jika Jawa sudah dapat dikuasai, maka berarti kekuatan Hindia Belanda sudah lumpuh sama sekali. Dengan menguasai secara politis di wilayah Hindia Belanda Jepang akan bebas bergerak untuk mengeruk kekayaan alam Hindia Belanda tanpa ada rintangan yang berarti. Anggapan ini memang terbukti benar setelah Jepang menaklukkan Hindia Belanda walau hanya berlangsung sebentar saja.

C. Realisasi Rencana Jepang Atas Wilayah Indonesia

Sebelum Jepang melaksanakan penyerbuannya ke wilayah Indonesia, terlebih dulu Jepang melakukan persiapan-persiapan guna mencapai tujuannya yang efektif dan efisien. Salah satu dari persiapan itu sebagai langkah awalnya adalah penyebaran spionase. Spionase aktif Jepang di Hindia Belanda dilaksanakan secara besar-besaran oleh Jepang sejak pertengahan tahun 1930. Salah satu alat spionase yang paling aktif adalah Naoju Warehousing Company, dengan tokohnya yang terkenal Naoju Aratame yang merupakan seorang perwira marinir yang khusus menangani

pekerjaan spionase.³³

Tujuan disembarkannya spionase tersebut adalah mengumpulkan informasi-informasi militer, mengadakan sabotase dan mencoba menyuap orang-orang sipil dan militer untuk dapat pro Jepang. Semua informasi yang diperoleh dikirim ke Jepang oleh seorang direktur utama perusahaan Nanyo Kyokai (perusahaan jasa pembiayaan perdagangan kecil dan pengiriman tenaga kerja). Surabaya sebagai suatu wilayah yang paling aktif terdapat kegiatan spionase Jepang. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa Surabaya merupakan pangkalan AL yang terpenting di Hindia Belanda. Banyak perusahaan Jepang didirikan di sana, diantaranya yang terpenting adalah perusahaan Kubota. Disamping itu banyak hotel dan rumah pelacuran yang digunakan sebagai tempat operasi para mata-mata untuk mendapatkan informasi-informasi penting.

Bentuk lain aksi spionase tampak dalam bidang pelayaran. Banyak nelayan-nelayan yang aktif di dekat Sumatera dan Laut Jawa. Hal ini ditujukan melakukan penyelidikan-penyelidikan daerah-daerah strategis dan mengetahui sejauh mana kekuatan AL Hindia Belanda. Walaupun demikian banyak terjadi para nelayan Jepang melakukan aksi subversif berupa teror-teror terhadap penduduk pribumi dan Belanda. Kadang-kadang juga terjadi perlawanan

³³Rosihan Anwar, Musim Berganti (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hal. 61

terhadap marinir Hindia Belanda jika kapal-kapalnya di-tahan.

Persiapan lain terlihat adanya penetrasi ekonomi Jepang ke Hindia Belanda. Banyak barang-barang Jepang dipasarkan ke Hindia Belanda dengan harga yang sangat murah. Hal ini sangat mudah dilaksanakan mengingat pada tahun 1930 terjadi krisis ekonomi dimana daya beli rakyat akan barang-barang produksi Jepang dapat memenuhi. Bentuk penetrasi lainnya adalah didirikannya perusahaan-perusahaan Jepang yang bergerak di bidang pertambangan, pertanian, perdagangan, dan kehutanan. Di antara perusahaan-perusahaan yang terkenal antara lain:³⁴

1. Nanyo Kohatsu Kabushiki (tanam kapas di Irian),
2. Nanyo Kohatsu di Kalimantan dan Sulawesi yang bergerak dalam penebangan kayu hutan,
3. Nanyo Werehousing Companie di Batavia,
4. Nanyo Kyokai di Batavia yang bergerak dalam bidang perdagangan,
5. Kubota di Surabaya.

Dari kegiatan-kegiatan itu dapat diperoleh berbagai informasi tentang peta kekuatan militer Hindia Belanda dan daerah-daerah strategis bagi pertahanan baik untuk Jepang, dan pertahanan yang digunakan oleh Hindia Belanda. Konsul Jepang Otosugu bahkan pernah menyatakan suatu kesimpulan bahwa Hindia Belanda dapat ditaklukkan hanya dengan 2000 tentara saja.

³⁴Rosihan Anwar, *ibid.*, hal. 61

Dari informasi-informasi yang didapatkan kemudian disimpulkan bahwa pertama-tama Jepang harus menduduki pelabuhan-pelabuhan minyak terlebih dulu secara utuh. Langkah lainnya adalah bahwa Jepang harus dapat merebut kepercayaan rakyat terhadap Jepang. Hal ini penting untuk dapat memperoleh dukungan rakyat dalam perang nantinya.

Sebelum perang dilancarkan, Jepang telah menyebarkan tentara-tentara dengan penyamarannya yang beraneka ragam bentuknya. Mereka banyak yang ikut dalam kegiatan spionase. Banyak perwira yang menyamar sebagai nelayan, pemilik toko, pedagang dan lain-lain. Sewaktu-waktu perang meletus, mereka siap beralih atau bergerak sebagai seorang serdadu yang sudah menguasai medan yang akan dilaluinya. Dengan demikian Hindia Belanda kurang waspada terhadap gerak-gerik orang-orang Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia dengan berbagai macam profesinya.

Langkah persiapan lain yang mendapatkan legalisasi dalam penetrasi ekonomi adalah dilakukan perundingan. Jepang melakukan perundingan yang diwakili oleh Kobayashi dan Hindia Belanda oleh van Mook yang berlangsung pada tahun 1940, tepatnya pada bulan September. Perundingan itu pada dasarnya merupakan tuntutan Jepang untuk dapat memperoleh minyak dalam jumlah yang lebih besar. Melihat situasi Hindia Belanda yang semakin terjepit (oleh keadaan dimana Belanda telah jatuh ke tangan Jerman dan putusya hubungan antara Hindia Belanda dengan

negeri induk), maka tuntutan-tuntutan Jepang semakin dipertajam dan diperluas dalam bidang kependudukan, perdagangan, dan penguasaan kekayaan alam terutama minyak dan karet.

Pada dasarnya perundingan tersebut tidak membuahkan hasil yang berarti, namun bagi Jepang perundingan tersebut memberikan banyak informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang ekonomis. Perundingan yang gagal bukan merupakan kebuntuan jalan bagi maksud Jepang untuk menguasai Indonesia. Jepang juga dapat melihat sejauh mana hubungan Hindia Belanda dengan sekutu-sekutunya dan kekuatan militernya saat itu.

Melihat situasi yang oleh Jepang diperhitungkan sudah saatnya, Jepang mulai membuka perang dengan lebih dahulu menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941 dengan membombardir Pearl Harbour. Untuk mudah mengalahkan Hindia Belanda, Jepang harus menghancurkan kekuatan Sekutu baik yang berada di Pasifik maupun di Asia Tenggara melalui operasi-operasi pendudukan secara serentak. Tentara ke 25 merebut Malaya, Tentara ke 15 di Birma-Thailand, Tentara ke 16 ke Hindia Belanda, dan Tentara Laut Selatan bertugas menguasai pulau-pulau di Samudera Pasifik.

Penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbour dilakukan dengan mendadak, dimana pada hari itu para pasukan Amerika yang bertugas di pangkalan tersebut baru menikmati hari libur. Ketidaksiapan itu juga dikarenakan serangan-

nya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 07.45' di Pearl Harbour.³⁵ Walaupun pangkalan tersebut sudah dapat dikatakan hancur, namun masih ada beberapa pesawat Amerika yang berhasil melarikan diri ke Australia, untuk mencari perlindungan dan menghimpun kekuatan baru.

Pada jam-jam berikutnya juga dilakukan penyerangan-penyerangan terhadap Siam, Malaka, Filipina, dan Singapura. Satu per satu wilayah tersebut jatuh ke tangan Jepang, dimana pasukan Sekutu yang berada di wilayah tersebut tidak dapat membendung pasukan Jepang yang jumlahnya sangat besar dan dengan peralatan perang yang serba modern.

Jatuhnya Malaya, Filipina, dan Singapura akan membahayakan sekali terhadap moral dan juga sistem pertahanan wilayah Hindia Belanda, yang sudah menyatakan perang melawan Jepang. Wilayah-wilayah tersebut diharapkan sebagai suatu benteng pertahanan yang dianggap kuat di sebelah utara dan timur wilayah Hindia Belanda.

Dalam penaklukan wilayah Hindia Belanda diklasifikasi ke dalam tiga wilayah, yaitu penaklukan pulau-pulau di luar Jawa, penaklukan Laut Jawa, dan terakhir penaklukan Pulau Jawa yang merupakan benteng terakhir pertahanan wilayah Hindia Belanda, dan sekaligus merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda.

³⁵C. Bijkerk, Selamat Tinggal Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik (Dokumenter Runtuhnya Hindia Belanda) (Jakarta: Djambatan, 1988), hal. 144

1. Penaklukan pulau-pulau di Luar Pulau Jawa

Tujuan strategi perang Jepang pertama-tama sebetulnya diarahkan untuk menguasai tambang-tambang minyak secara utuh, sebagai bekal untuk melakukan perang - perang berikutnya. Dari Indochina pasukan Jepang langsung menyerbu daerah tambang minyak di Miri Brunai. Dari arah Pulau pasukan Jepang menyeberang ke Tarakan, yang akhirnya dalam tempo tiga hari hanya berhasil mempertahankan diri di bawah Letkol de Wall. Di dekat Tarakan Jepang kehilangan dua kapal penyapu ranjau, sedangkan Hindia Belanda sendiri dapat dikatakan mengalami kekalahan total.

Dari Tarakan tentara Jepang menuju Balikpapan, dan melakukan pembantaian terhadap pasukan Belanda yang berada di sana. Di Balikpapan tentara Jepang tidak mendapat perlawanan yang berarti, sehingga mempermudah bagi tentara Jepang untuk mendudukinya sebelum melakukan penyerangan lebih lanjut ke Samarinda. Di Samarinda tentara Jepang merusak total lapangan terbang pada tanggal 25 Januari 1942. Dalam peperangan di Samarinda terdapat bantuan dari Amerika berupa 4 kapal torpedo yang sudah tua, dan berhasil menenggelamkan beberapa kapal penyapu ranjau Jepang. Walaupun demikian akhirnya Samarinda juga berhasil diduduki Jepang.

Pulau Sumatera diserang Jepang lewat jalur Malaya (akibat salah perkiraan oleh tentara Inggris sehingga mudah ditaklukkan). Inggris mengira Jepang akan menyerbu Malaya lewat pantai timur, tetapi diluar dugaan Jepang

menyerbu lewat jalur darat di belakang pertahanan Inggris di sana. Dari Malaya Jepang langsung menyeberang ke Sumatera dan terutama ke Palembang. Dalam mencapai Palembang digunakan tentara parasut yang diangkut oleh 100 pesawat. Misi Hindia Belanda untuk melakukan pengrusakan dan pembumihangusan tambang-tambang minyak yang ada terpaksa tidak dapat dilaksanakan.

Jepang juga menyerang Hindia Belanda dari arah timur dibawah Nishimura dan Takagi. Setelah Pearl Harbour jatuh, Jepang mendirikan pangkalan operasi di Pulau. Setelah Filipina jatuh, Jepang melancarkan serangan ke Selatan dan menduduki Menado (Januari 1942), Ambon (akhir Januari), Ujung Pandang (Februari), kemudian Nusa Tenggara dan akhirnya juga Irian pada bulan Februari.³⁶

2. Pertempuran di Laut Jawa

Dari pihak Hindia Belanda dan Sekutu, yang berperan dalam pertempuran ini adalah ABDA (America British Dutch Australia). Situasi ABDA di Laut Jawa secara taktis sudah terkepung dengan diduduki wilayah-wilayah di luar Jawa. Demikian juga benteng pertahanan laut di sebelah utara juga telah dihancurkan dengan dipatahkannya serangan-serangan terhadap Malaya, Filipina, dan Singapura.

Laksamana Muda Karl Doorman menerima perintah dari Helfrich sebagai komandan ABDA untuk melakukan penye-

³⁶G. Moedjanto, op.cit., hal. 70

rangan konvoi Jepang yang berlayat dari arah timur Pulau Bawean.³⁷ Karl Doorman memerintahkan agar kapal-kapal penjelajah beriringan dan didampingi oleh kapal-kapal perusak di sebelah kirinya, menuju arah barat laut. Hal ini sebagai suatu pertanda bahwa perang di lautan akan segera dimulai.

Pada awal mula pertempuran, mula-mula Doorman mendapat serangan dahulu dan meminta bantuan perlindungan - kepada Helfrich. Kapal Exeter dan Houston mendapat serangan yang hebat, sedangkan kapal-kapal seperti de Ruyter, Java, dan Perth melakukan penembakan - penembakan terhadap armada Jepang, namun serangannya kurang efektif. Kekurangefektifan itu seringkali menimbulkan kesalahanpahaman, dan hal itu banyak disebabkan oleh tiari asap yang dibuat Jepang untuk menghalangi penglihatan dari kapal-kapal Sekutu. Hal yang dirasa merupakan kekurangan dari Armada Sekutu adalah kurangnya sarana yang memadai dalam melakukan penyerangannya. Dalam hal ini Jepang berhasil selalu tepat dalam melepaskan tembakan-tembakannya karena menggunakan juga pesawat-pesawat pengintai untuk mempermudah melihat posisi lawan-lawannya.

Kapal Exeter mengalami rusak berat setelah diserang dengan hebatnya oleh armada Jepang. Disamping itu juga kapal Houston yang salah faham melihat Exeter berbelok arah, akhirnya juga ikut berbelok dengan diikuti oleh

³⁷David Thomas, The Battle of the Java Sea (London: Pan Books LTD, 1968), halaman 142

Perth dan Java. Dengan demikian posisi kapal-kapal Sekutu menjadi kacau, sehingga memudahkan bari armada Jepang untuk menyerang dan menenggelamkan bersama awak kapalnya.

Satu per satu kapal Sekutu mulai berhasil ditenggelamkan oleh serangan Jepang maupun oleh ranjau-ranjau yang dipasangnya sendiri di sepanjang Pantai Utara Jawa. De Ruyter dan Houston akhirnya dengan perjuangan yang melelahkan juga akhirnya berhasil ditenggelamkan. Hal itu berarti tinggal dua kapal yang kuat untuk melanjutkan pertahanan wilayah Hindia Belanda, tetapi kemudian juga melarikan diri ke Tanjung Priok. Demikian juga kapal-kapal Sekutu yang tersisa dengan selamat kemudian melarikan diri mencari perlindungan. Pelarian kapal-kapal tersebut juga akhirnya tidak dapat lolos dari penjagaan armada Jepang yang sangat ketat. Dengan demikian banyak kapal-kapal Sekutu yang ditenggelamkan bersama dengan awak kapalnya. Hal ini menjadikan pertanda bahwa armada Hindia Belanda dan Sekutu sudah mendekati kehancurannya.

Sebagian kapal-kapal kecil Sekutu yang selamat, kemudian melarikan diri ke Australia dan New Zeland. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kini Laut Jawa sudah terbebas dari pertahanan ABDA. Kapal Java sendiri telah berhasil ditenggelamkan pada tanggal 27-2-1942 menjelang tengah malam oleh Takagi.

Dengan dikuasainya Laut Jawa oleh armada Jepang, maka semakin dekatlah upaya Jepang untuk mencapai pusat pertahanan dan pusat pemerintahan Hindia Belanda yaitu

di Jawa. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Jepang telah menunjukkan suatu koporasi militer yang betul-betul militan. Pasukan-pasukan itu diantaranya didukung oleh tokoh-tokoh seperti Laks. Takagi, Laks. Tanaka, Jenderal Imamura, dan Laks. Ozawa yang memimpin Western Attack Group.

Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang sudah mulai melakukan pendaratan-endaratan di Jawa, yaitu di daerah Kranggan dekat Tuban dibawah Sakaguchi dari Divisi 48, kemudian di Banten oleh Imamura dari Devisi 2, dan di Pantai Utara Bandung oleh pasukan dibawah Kolonel Shoji. Dengan pendaratan-endaratan tersebut, sudah siaplah Jepang untuk selanjutnya melakukan penyerangan-penyserangan terhadap militer Hindia Belanda di daratan Jawa.

3. Pertempuran di Jawa sampai Kapitulasi Kalijati

Dengan dikuasainya Laut Jawa oleh pasukan armada Jepang, praktis secara strategis Jawa menjadi terisolasi dan bantuan dari luar akan sulit didapatkan. Sementara Jawa dipertahankan oleh Hindia Belanda dengan prioritas Jawa Barat, dimana pusat pemerintahan yang utama berada secara de facto.

Jepang mulai mendarat di Jawa dengan pucuk pimpinan Jenderal Imamura, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara ke 16, yang bertugas memimpin pendaratan di Jawa. Pendaratan mula-mula dipusatkan di tiga tempat utama, yaitu di Banten, dekat Indramayu, dan dekat

Kranggan. Dalam permulaan pendaratannya di Merak, satu-satuan KNIL yang bertahan di sana masih sempat melakukan perlawanan.³⁸ Pendaratan-endaratan di tempat lain bisa dikatakan dapat dilakukan dengan mudah mengingat satuan-satuan KNIL yang bertugas lebih sedikit daripada di Banten. Oleh karena itu di tempat lain pendaratan lebih mudah dicapai, untuk selanjutnya terus melakukan penyerangan ke daerah-daerah pedalaman.

Di Jawa Timur Jepang setelah melakukan pendaratan, Jepang melakukan penyerangan terhadap pusat kota Surabaya, lapangan terbang Singosari (Malang) dan Maospati (Madiun). Dalam pertempuran ini Jepang berhasil melumpuhkan hampir seluruh kekuatan udara yang berada di Jawa Timur. Pertambangan minyak di Cepu juga menjadi sasaran utama serangan Jepang, namun sudah terlanjur dibumihanguskan lebih dulu oleh pasukan KNIL sebelum mereka kemudian melarikan diri. Usaha Jepang dilakukan untuk memutuskan jalur perhubungan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Pertahanan di Jawa Timur sudah dilumpuhkan pada tanggal 3 Maret.

Dari Jawa Timur pasukan Jepang kemudian menuju Solo dan Yogyakarta lewat jalur Madiun. Di Yogyakarta tentara Hindia Belanda mendapat bantuan dari Legion Mangkunegaran. Karena secara kuantitas dan kualitas tentara Hindia Belanda berada di bawah pasukan Jepang, maka kedua wila-

³⁸Djajusman, op.cit., hal. 184

yah tersebut berhasil dikuasainya pada tanggal 7 Maret. Selanjutnya Jepang berusaha untuk secepatnya dapat menguasai Cilacap secara utuh, dan berhasil dengan melalui pertempuran yang berlangsung dalam tempo dua hari.

Dengan dikuasainya Cilacap, pasukan KNIL yang berada di sana berusaha melarikan diri ke India dan Australia lewat Samudera Hindia. Jepang telah menempatkan pasukan armadanya juga di situ. Dengan demikian pengungsian-pengungsian KNIL ke luar tidak dapat memberikan jaminan bahwa tentara KNIL akan selamat dan lebih terancam akan ditenggelamkan oleh armada Jepang di Laut Selatan. Pasukan KNIL yang tinggal dan terpaksa tidak dapat melarikan diri berusaha melakukan pengrusakan - pengrusakan terhadap jalan dan jembatan guna memperlambat gerak maju pasukan Jepang lebih lanjut.

Armada Jepang yang mendarat di Banten dibawah Imamura mengalami hambatan. Kapal yang ditumpanginya terkena bom dan kemudian tenggelam, sehingga awak kapalnya harus terjun ke laut dan berenang untuk mencapai pantai. Beberapa saat kemudian mereka segera bergerak ke arah timur dan mendapatkan perlawanan yang serius. Tentara KNIL yang berada di Batavia kemudian meninggalkan Batavia untuk selanjutnya memusatkan perhatiannya ke Bandung.

Kalijati yang memiliki lapangan terbang yang dikategorikan sebagai lapangan terbang terbesar dan terkuat di Jawa Barat, pada tanggal 1 Maret 1942 akhirnya menda-

pat serangan yang hebat dari pasukan Jepang. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan landasan pacu bagi pesawat-pesawat terbang yang akan mendarat dan tinggal landas. Pertahanan Kalijati selanjutnya diserahkan kepada tentara Inggris yang dapat dikatakan kurang menguasai terhadap medan pertempuran yang akan dilaluinya. Hal ini mempermudah bagi pasukan Jepang untuk menyerangnya, setelah ada bantuan bagi Jepang yang mendarat di dekat Indramayu. Penguasaan Kalijati beserta isinya sangat membantu bagi pertempuran-pertempuran berikutnya, karena disamping telah merebut landasan terbang, Jepang juga berhasil menyita beberapa pesawat tempur, minyak, perbengkelan, dan juga dokumen-dokumen rahasia Hindia Belanda.

Walaupun lapangan terbang Kalijati telah dikuasai, namun pasukan KNIL masih sempat melakukan serangan-serangan terhadap pasukan Jepang yang menguasai wilayah tersebut, dimana pasukan KNIL memusatkan seluruh pasukannya di lapangan terbang Andir Bandung. Serangan itu akhirnya dibalas oleh Jepang dengan melakukan penyerangan yang hebat ke lapangan Andir pada tanggal 3 Maret 1942. Secara taktis Jawa Barat terutama Bandung sudah terisolasi terhadap bala bantuan dari luar Jawa Barat. Pertahanan terakhir Hindia Belanda diharapkan hanya dari pasukan-pasukan yang masih berada di Jawa Barat saja.

Keadaan Bandung kian hari kian padat akan pengungsi yang berasal dari luar Bandung. Hal ini mengakibatkan -

pimpinan pasukan KNIL memohon kepada bawahannya untuk tidak melakukan pertempuran lebih lanjut. Sekarang sudah tidak ada alternatif lain kecuali menyerah kepada Jepang. Usaha ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942, tetapi tepatnya tanggal 8 atau 9 Maret 1942 sampai kini tidak ada bukti-bukti yang autentik. Naskah perjanjian itu sendiri sampai sekarang beluk diketahui keberadaannya. Dari beberapa sumber yang diperoleh dalam skripsi ini mengikuti versi penyerahan pada tanggal 8 Maret 1942 saat terjadinya perundingan itu. Ada sumber yang juga menyatakan pada tanggal 9 Maret hasil perundingan itu secara samar-samar harus disiarkan lewat gelombang radio.

Lepas dari masalah waktu yang tepat, hilangnya imperium Hindia Belanda berakibat hilangnya juga sumber pendapatan yang sangat penting bagi perekonomian Hindia Belanda yang telah diperoleh dan dikelola bertahun-tahun secara menyedihkan, seperti yang digambarkan oleh JC. Bijkerk:

'Telah tiba suatu hari yang dengan radikal mengakhiri suatu kekuasaan yang ada dengan seluruh nilai-nilai eksistensinya. Nyala api imperium Belanda padam secara perlawanan-perlahan. Sekaratnya imperium di seberang lautan mengumandangkan suatu akhir yang telah pasti, tetapi bagi hampir seperempat juta orang Belanda di katulistiwa itu, sekaligus merupakan awal dari suatu sengsara jika tidak akan dikatakan sebagai suatu periode yang fatal'.³⁹

³⁹C. Bijkerk, *op.cit.*, hal. 229.

Maksud Hindia Belanda untuk menyerah disebabkan karena kota Bandung penuh dengan penduduk dan pengungsi, dimana jika Hindia Belanda tidak menyerah secara total maka tersebut akan dihancurkan beserta seluruh isinya. Hal ini tentu menyebabkan pimpinan KNIL harus menentukan pilihan yang dilematis sifatnya. Penyerahan tak bersyarat Hindia Belanda banyak menimbulkan keheranan dan kemarahan di kalangan Belanda, karena militernya yang dianggap dilatih sangat lama justeru menyerah dalam waktu yang sangat singkat.⁴⁰

Dalam bab berikut akan dilihat dimana letak keunggulan-keunggulan Jepang di satu pihak dibandingkan dengan keunggulan dan kelemahan Hindia Belanda dalam masa Perang Dunia II khususnya dalam perebutan wilayah Indonesia. Keunggulan itu akan dilihat dari segi kekuatan militer antara kedua belah pihak dan juga dukungan rakyat Indonesia dalam peperangan yang terjadi.

⁴⁰Onghokham, op.cit., hal. 267

BAB IV

KEUNGGULAN JEPANG ATAS HINDIA BELANDA

Pada bagian terdahulu telah dibahas tentang pertempuran-pertempuran antara Jepang melawan Hindia Belanda. Penaklukan suatu negara yang berlangsung hanya dalam waktu tiga bulan, dapat dikatakan sebagai suatu penaklukan yang sangat cepat. Mulai dari penaklukan Wilayah Tarakan dan sekitarnya pada awal Januari, kemudian dilanjutkan ke arah selatan menuju jantung pertahanan Hindia Belanda. Pertempuran di Laut Jawa merupakan penaklukan Angkatan Laut Hindia Belanda secara total, mengingat kapal-kapal perang andalannya beserta awak kapalnya dihancurkan dan ditenggelamkan. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Hindia Belanda telah mengerahkan seluruh kekuatan lautnya dengan gigih dan segala daya, tetapi karena kekuatan secara fisik dan psikis kurang sebanding maka akhirnya mengalami kekalahan.⁴¹

Jawa sebagai pusat pertahanan Hindia Belanda, dapat ditaklukkan Jepang hanya dalam waktu delapan hari pertempuran. Pendaratan-pendaratan pasukan Jepang di beberapa tempat di Pantai Utara Jawa kecuali di Banten dapat dilakukan dengan mudah dan hanya mengalami sedikit perlawanan yang berarti. Pendaratan di Banten yang dipimpin

⁴¹Djajusman, *op.cit.*, hal. 221

oleh Imamura, mengalami hambatan sehingga harus bersusah payah untuk mencapai pantai karena kapal yang ditumpungnya ditorpedir oleh torpedo-torpedo Sekutu hingga pecah dan tenggelam.

Pertempuran-pertempuran di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah pertempuran yang sangat menentukan bagi pertahanan Hindia Belanda terhadap status quo-nya di masa-masa berikutnya. Pada saat lapangan Andir Bandung sudah dikepung oleh tentara Jepang, timbul dilema bagi pemerintah Hindia Belanda. Dilema itu pada satu sisi Hindia Belanda harus menyerah secara tak bersyarat kepada Jepang, atau sisi yang lainnya Lapangan Andir dan kota Bandung yang penuh dengan para pejabat dan penduduk sipil itu akan dihancurkan. Akhirnya Hindia Belanda memilih untuk menyerah kepada Jepang secara tak bersyarat, walaupun ada perintah dari Kabinet Nederland di London bahwa dalam keadaan apapun Hindia Belanda jangan menyerah atas nama seluruh tentara Hindia Belanda.

Penyerahan tak bersyarat Hindia Belanda kepada Jepang berlangsung di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Mengenai kapitulasi di Kalijati terdapat hal-hal yang dipandang merupakan suatu keganjilan. Keganjilan tersebut tampak dalam penandatanganan kapitulasi yang dilakukan oleh Ter Poorten sebagai Panglima KNIL, bukan oleh Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi di Hindia Belanda. Pendapat yang sering dilontarkan adalah bahwa jika yang menandatangani kapitulasi itu Ter Poorten, ma-

ka dianggap yang menyerah hanya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL) saja. Hal tersebut dapat dibenarkan mengingat pemerintahan sipil tetap berjalan terus dalam bentuk NICA (Netherlands Indies Civil Administration), yang berkedudukan di Brisbane Australia.⁴²

Kekalahan perang Hindia Belanda atas Jepang disebabkan oleh faktor-faktor baik ekstern maupun intern Hindia Belanda sendiri. Faktor ekstern tampak dengan didudukinya negeri Belanda oleh Jerman, yang membuat Hindia Belanda harus dapat mempertahankan diri tanpa dapat mengharapkan bala bantuan dari negeri induknya. Bantuan dari luar diharapkan datang dari sekutu-sekutunya, namun masih dirasa kurang mengingat Sekutu sendiri harus memperhatikan kepentingan negerinya sendiri maupun wilayah koloninya masing-masing.

Faktor intern yang menyebabkan kekalahan Hindia Belanda terdiri dari beberapa hal yang berkaitan dengan faktor militer, ekonomi, politis, dan mental spiritual. Faktor militer berkenaan dengan kekuatan militer perang baik dari segi materiil dan personel secara kuantitas maupun kualitasnya. Faktor ekonomi berkaitan dengan kurangnya pembangunan industri-industri persenjataan yang akan mendukung perang bagi Hindia Belanda. Faktor politis berkenaan dengan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah, maupun dalam hubungan antara

⁴²G. Moedjanto, op.cit., hal. 72

rakyat dengan pemerintah dengan berbagai kondisinya.

Sejarah penaklukan Hindia Belanda oleh Jepang yang dikatakan begitu mudah, dipengaruhi faktor-faktor yang secara garis besar telah disinggung di atas. Untuk lebih mudahnya dapat digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu dalam dukungan rakyat, keunggulan militer, dan strategi - organisasi perang. Untuk melihat sejauhmana keunggulan Jepang atas Hindia Belanda, uraian berikut merupakan deskripsi sederhana dari faktor-faktor tersebut.

A. Letak Dukungan Rakyat

Suatu perang terlebih untuk menaklukkan suatu wilayah biasanya didahului oleh beberapa aksi sebelum perang itu dilaksanakan. Aksi tersebut salah satu diantaranya - adalah penyebaran mata-mata untuk mendapatkan informasi-informasi penting tentang tempat-tempat strategis dan seberapa besar kekuatan lawan yang akan dihadapinya. Disamping itu juga ada upaya untuk mengusahakan adanya dukungan dari penduduk setempat dalam perang itu nantinya.

Dalam bab terdahulu telah disinggung tentang sikap bangsa Indonesia yang apathis dan pasif dalam memberikanantisipasi perang yang akan terjadi. Sikap yang demikian itu disebabkan oleh faktor ekonomis dan politis. Faktor ekonomis yang menyebabkannya adalah bahwa banyak dari pengeluaran negara pada tahun 1941 diarahkan untuk kepentingan defensi dan pembeayaan pemerintah pelarian Belanda di London. Secara finansial beban tersebut dibe-

bankan kepada rakyat Indonesia, misalnya dengan menaikkan pajak sampai 2,5 kali lipat. Pajak yang berat itu ditambah lagi dengan diundurnya program-program sosial terutama pembangunan dalam bidang pendidikan dan perindustrian yang mengalami regresi.

Pembebanan pajak-pajak yang tinggi itu justru tidak digunakan untuk kepentingan defensi Hindia Belanda sendiri yang sudah dekat dengan ancaman Jepang. Hal ini disamping menimbulkan kebencian rakyat terhadap rezim kolonial, juga menimbulkan beban penderitaan rakyat. Hal ini juga menimbulkan banyak kritik dari kalangan nasionalis dan kalangan lain. Golongan Indische Burgerij juga mengkritik, mengapa semua uang itu digunakan untuk peperangan di Eropa, sementara Hindia Belanda sendiri terancam.⁴³

Faktor politis yang menyebabkan rakyat pasif dan apatis terlihat dengan adanya kritik golongan nasionalis yang menolak anggaran belanja untuk angkatan laut karena tidak memberi jaminan bahwa orang-orang Indonesia tidak diberi cukup partisipasi dalam pertahanan tanah airnya. Bangsa Indonesia menjadi terhina bila mereka tidak boleh ikut serta dalam pertahanan negerinya. Faktor politis lainnya berkaitan dengan sikap pemerintah yang terlalu kaku dan angkuh dalam menanggapi usul-usul perubahan ketatanegaraan dari kalangan nasionalis. Dengan penolakan-

⁴³Onghokham, op.cit., hal. 212

penolakan tersebut dirasakan bahwa suatu permintaan bahkan maksud untuk ikut membantu dalam peperangan dengan imbalan mengadakan perubahan ketatanegaraan yang sederhanaupun ditolak mentah-mentah. Hal ini berakibat kaum pergerakan memperkuat organisasi dan rasa persatuan bangsa.⁴⁴

Jika dilihat bentuk konkretnya, memang sulit dilihat kepada siapa atau pihak mana sebenarnya rakyat berdiri. Memang ada pro dan kontra antara pemerintah dengan kaum pergerakan, namun disisi lain pada saat Jerman menyerbu negeri Belanda banyak dari golongan nasionalis - yang kontra justru menyatakan loyalitas terhadap negeri Belanda (misalnya Cipto Mangunkusumo dan Dr. Sutomo). Perasaan loyalitas tersebut sebenarnya disebabkan karena kaum pergerakan pada umumnya hanya tidak bersimpati terhadap fascis yang identik dengan kekejaman.

Dipihak lain kaum pergerakan dan rakyat sudah terpengaruh begitu mendalam oleh Ramalan Djajabaja, dimana pada suatu saat nanti kekuasaan bangsa kulit putih akan berakhir dan akan digantikan oleh kekuasaan bangsa kulit berwarna, dan selanjutnya akan merdeka. Dalam situasi yang demikian itu kiranya sulit untuk mengetahui ke arah mana sebetulnya rakyat berpihak. Walaupun banyak para pemimpin dan kaum terpelajar Indonesia tidak gembira dengan rezim totaliter yang akan datang, namun rakyat ham-

⁴⁴Marwati Djoened P. (ed), op.cit., hal. 89

pir di semua tempat mengelu-elukan kedatangan 'saudara tua' Jepang.⁴⁵

Dari situasi yang demikian itu, menimbulkan mental khusus bagi kedua belah pihak. Untuk pihak Jepang hal itu memberikan dukungan mental bahwa rakyat menerima kedatangan mereka, lebih-lebih bagi rakyat yang berada di Pantai Utara Jawa. Bagi pihak Hindia Belanda situasi yang seperti itu banyak melemahkan semangat tempur mereka, karena ada semacam prediksi bahwa rakyat akan mendukung Jepang.

Pada saat perang terjadi, memang terdapat semacam milisi rakyat terbatas, namun tidak mendapatkan banyak bantuan bagi Hindia Belanda. Hal ini disebabkan karena milisi tersebut sudah terlambat. Keterlambatan ini menyebabkan atau berpengaruh terhadap pola berperang mereka yang masih sederhana melawan prajurit-prajurit Jepang yang sudah profesional. Sistem bertemper mereka masih menggunakan pola yang diajarkan dalam keraton (misalnya Legion Mangkunegaran dan Legion Pakualaman), dimana mereka tidak dipersiapkan untuk bertempur melawan pasukan yang memang sudah betul-betul profesional.

Kelemahan Hindia Belanda dalam hal dukungan rakyat sebetulnya dihambat oleh sikapnya sendiri terhadap kaum pergerakan khususnya, yang sebetulnya dapat menggerakkan gelora rakyat untuk melawan Jepang. Bagaimanapun juga kunci mobilitas rakyat pada masa itu sangat tergantung pada kaum pergerakan. Oleh karena ada semacam rasa frus-

trasi di kalangan kaum pergerakan, maka walaupun mereka menyatakan loyalitasnya tetapi terdapat semacam perasaan apatis dalam menggerakkan rakyatnya.⁴⁶

Dengan demikian pada dasarnya rakyat tidak mendukung secara nyata pada Hindia Belanda. Bagaimana halnya terhadap Jepang? Di Sumatera dimana para agen F. KIKAN dapat berfungsi dengan baik, rakyat di sana berhasil dihasut oleh Jepang untuk mendukung pasukan Jepang dalam pembebasan Asia dari kolonial Barat. Hal itu banyak menampilkan hasil, dimana pada saat pasukan Jepang mendarat di sana banyak penduduk pribumi yang memberikal bekal-bekal dan barang-barang yang berguna bagi Jepang.

Pernah terjadi suatu kegemparan yang terdapat di suatu pantai dengan tibanya pengangkut pasukan Jepang. Sebagaimana siatur lebih dulu, penduduk pantai keluar membawa air segar, buah, minuman, ayam dan daging serta melambaikan bendera Jepang dengan sambutan yang riuh rendah. Rakyat juga telah mengumpulkan sepedanya dan kendaraannya supaya dapat dipergunakan oleh pasukan Jepang, mereka juga sudah membersihkan jalan dan mengamankan jembatan utama yang kini dijaga oleh pengawal, dan mereka siap untuk menyerahterimakan bahan-bahan mentah yang penting kepada Angkatan Perang Jepang.⁴⁷ Hal ini

⁴⁶Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (Jakarta: LPPES, 1987), hal. 262

⁴⁷Fujuwara Iwaichi, F. KIKAN Operasi Intelijen Tentara Jepang di Asia Tenggara Selama Perang Dunia II (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 259

menunjukkan bahwa secara regional banyak dukungan yang diperoleh oleh pasukan Jepang dalam saat awal pertempurannya dengan pasukan Hindia Belanda.

B. Keunggulan Personil-Materiil Militer Jepang

Keunggulan personil yang dimaksud adalah keunggulan dari para prajurit Jepang dalam hal baik kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan keunggulan materiil militer yang dimaksud adalah keunggulan dalam peralatan perang yang digunakan Jepang dari alat yang ringan sampai alat berat untuk berperang.

Keunggulan dalam hal personel saja tidak akan berarti tanpa adanya dukungan segi material perang yang digunakannya.

1. Keunggulan Personel Militer Jepang

Pada dasarnya tentara Hindia Belanda hanya merupakan tentara polisi yang ditujukan pada keamanan dalam negeri yang hanya bisa bertempur terhadap rakyat yang tidak bersenjata, yang hanya bisa berpatroli dalam hubungan regu atau pleton.⁴⁸ Jadi sebelum perang meletus tentara Hindia Belanda tidak dalam keadaan siaga untuk bertempur di medan pertempuran yang sesungguhnya, berhadapan dengan tentara yang profesional lengkap dengan persenjataannya.

⁴⁸A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan I (Bandung: Angkasa, 1977), hal. 75

Jika dilihat ke belakang, tentara Belanda yang berada di wilayah Hindia Belanda belum pernah terlibat secara nyata dalam kancah peperangan yang besar. Di Hindia Belanda mereka biasa berperang melawan pemberontakan-pemberontakan daerah dengan persenjataan tradisional dan dengan strategi yang masih primitif. Hal ini memberi kondisi tersendiri bagi tentara Hindia Belanda untuk tidak mempersiapkan diri guna perang yang lebih modern.

Menjelang perang meletus, terpikir oleh Hindia Belanda untuk menyusun pasukan defensi yang sebenarnya, diantaranya diadakan milisi terbatas bagi rakyat. Akan tetapi berhubung waktunya sangat dekat, maka bisa dikatakan sudah terlambat.⁴⁹ Jika ditelusuri faktor yang menyebabkan Hindia Belanda lalai dalam membangun angkatan perangnya untuk menghadapi bahaya yang akan datang, maka van Mook membelanya bahwa orang-orang Belanda, Indonesia, dan China pada dasarnya adalah orang yang suka damai, dan pula mereka tidak menganggap soal-soal kemiliteran sebagai anasir kebebasan bangsa. Orang-orang Hindia Belanda tidak pernah terlibat dalam suatu perang internasional, dan Hindia Belanda tinggal tetap aman dan sentosa sejak permulaan abad 20.⁵⁰

⁴⁹T.B. Simatupang, Pelopop Dalam Perang Pelopop Dalam Damai (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hal. 54

⁵⁰O.D. Sihombing, Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang (Jakarta: Sinar Djaja, 1962), hal. 67-68

Lain halnya dengan tentara Jepang, yang sudah menjadi prajurit-prajurit profesional yang telah dilahirkan semenjak restorasi Meiji, bahkan bisa dikatakan sebagai tentara profesional yang terbaik di Asia.⁵¹ Dari permulaan pecahnya perang di Asia Timur, tentu sudah banyak pengalaman-pengalaman yang sangat berarti bagi kemajuan dalam segi tehnik dan strategi perang mereka untuk diterapkan terhadap Hindia Belanda. Kemenangan - kemenangan mereka sebelum mencapai Hindia Belanda juga memberikan sportifitas tersendiri bagi sikap mental para prajurit Jepang.

Pengabdian tentang Jepang dilandasi oleh semangat 'Bushido', dan dalam hal ini mereka berani mati untuk keunggulan Kaisar dan negara Jepang. Disamping itu dasar-dasar ideologis Jepang banyak berpengaruh terhadap mental spiritual para prajurit Jepang. Hal ini membuat suatu keunggulan tersendiri terhadap kekuatan dari dalam jiwa para prajurit Jepang dalam menghadapi pasukan Hindia Belanda.

Dilihat dari segi jumlah tentara, menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Kekuatan KNIL pada tahun 1939 diseluruh Hindia Belanda adalah sebagai berikut:⁵²

⁵¹Amos Perlmutter, Militer dan Politik (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 112

⁵²Djajusman, op.cit., hal. 33

Tentara Sukarela	38.928
Opsir cadangan	1.783
Milisi	13.263
Landstorm	17.596
Korps Bumiputera	4.575
	<hr/>
Jumlah	76.145 +

Pada tahun 1942 secara keseluruhan jumlah tentara berkembang menjadi kurang lebih 85.000 yang terdiri baik dari milisi Indonesia, milisi yang dimobilisir, landstorm, dan penjaga-penjaga kota atau polisi keamanan. Dari sekian itu tentara yang sungguh-sungguh berperang terdiri dari 30.000 orang, 25.000 di antaranya ditempatkan di Pulau Jawa dan sisanya di luar Jawa. Hal itu lebih disebabkan karena pemerintah Hindia Belanda khawatir nanti akan ada pemberontakan-pemberontakan sebagai akibat kegoncangan masyarakat, karena serbuan Jepang. Dalam hal ini tugas pasukan Hindia Belanda terbagi-bagi tetapi tidak semuanya dikonsentrasikan untuk perang melawan Jepang. Dengan kekuatan militer yang sangat minim dan tanpa dukungan rakyat, Hindia Belanda maju ke medan perang.

Kekuatan Sekutu yang dikerahkan di Pulau Jawa terdiri dari 3 resimen invanteri Belanda, 3 Batalyon Austria, satu kompi taruna akmil kerajaan dan Panglima Cadangan. Di Jawa Tengah 4 Batalyon infanteri sedangkan di Jawa Timur oleh 3 Batalyon bantuan Indonesia dan satu Batalyon Marinir. Kekuatan yang demikian harus menghadapi pasukan Jepang yang mendaratkan divisi kedua di Jawa Barat dan devisi ke 48 di Jawa Tengah dan dekat perbatasan Jawa Timur yang dipimpin oleh Letjen Imamora. Pa-

sukan itu terdiri dari tiga resimen infanteri dan satu resimen kavaleri, zeni dan angkutan, ditambah lagi dengan divisi ke-38 yang terdiri dari dua Batalyon Infanteri di Jawa Barat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdiri dari 3 resimen infanteri, satu Brigade infanteri dengan bantuan satu batalyon pasukan perintis, dan beberapa satuan artileri. Brigade Sakaguchi yang telah merebut wilayah Tarakan dan Balikpapan melanjutkan pertempurannya menyeberang ke Jawa.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kekuatan invasi Jepang menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar dari kekuatan Hindia Belanda dan Sekutunya. Di samping itu juga, Jepang mempunyai bantuan udara taktis sedangkan Hindia Belanda tidak memilikinya lagi karena telah dihancurkan pada pertempuran-pertempuran sebelumnya di luar Jawa.

Menjelang akhir keruntuhannya, sebetulnya Hindia Belanda mempunyai kesempatan untuk menjalankan perang gerilya dengan maksud mengganggu dan menghambat gerak maju Angkatan Perang Jepang. Perang gerilya itu tidak berjalan baik dan lancar karena rencana itu tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Perang gerilya hanya dijalankan dengan baik dan berhasil jika rakyat mendukung dan turut berperan serta.⁵³

⁵³Sagimun MD., Mastrip: dari Brigade Pertempuran ke Brigade Pembangunan (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 36

Di Sumatera agen Fujiwara Kikan berhasil menggerakkan rakyat untuk mengadakan penyambutan atas kedatangan pasukan Jepang. Gerakan itu bisa dilakukan karena rakyat telah terhasut untuk ikut mendukung tentara Jepang atas operasi yang akan dilancarkannya. Bagaimanapun juga sumbangan itu sangat bagi gerak maju pasukan disatu pihak, dan dapat melemahkan mental spiritual bagi pasukan Hindia Belanda yang mengetahui akan fenomena tersebut.

2. Keunggulan dalam Peralatan Militer

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930, mengakibatkan Hindia Belanda kurang mampu mengadakan pembangunan dalam bidang industri militer yang hampir tak ter pikirkan. Sampai pada saat perang meletus, banyak persenjataan yang dimiliki Hindia Belanda merupakan senjata-senjata yang sudah sangat tua. Hal ini merupakan salah satu kesulitan bagi Hindia Belanda, misalnya tentang kapal-kapal torpedonya berasal dari tahun 1926 dan dapat dikatakan tidak modern lagi. Juga kapal-kapal transportnya yang tidak dilengkapi dengan persenjataan menunjukan kelemahan persenjataan di dalam Militer Hindia Belanda. Hal ini lebih disebabkan juga karena Hindia Belanda sejak Perang Dunia I masih berpegang pada konvensi internasional dimana kapal pelayaran tidak boleh dipersenjatai atau ditenggelamkan, tanpa melihat gejala perkembangan politik dunia selanjutnya yang sudah banyak ditinggalkan dalam praktek oleh negara-negara lain.

Ada usaha Pemerintah Hindia Belanda yang dengan tergesa-gesa memesan beberapa tank dari Scotlandia dan memesan beberapa kapal terbang dari Amerika. Pesanan-pesanan itu tidak diterima oleh Hindia Belanda sampai pada saat Hindia Belanda ditaklukkan oleh Jepang pada bulan Maret tahun 1942. Hal itu disebabkan oleh karena negara-negara di Eropa harus memenuhi kebutuhannya sendiri dulu, dan banyak disebabkan juga oleh ditenggelamkannya kapal-kapal pengangkut pesanan itu.

Kekuatan armada inti Hindia Belanda seluruhnya memiliki tiga kapal penjelajah ringan (Java, de Ruyter, Sumatera) 7 kapal torpedo pemburu, 2 buah kapal selam. Sedangkan Angkatan Udara memiliki seluruhnya 275 pesawat terbang baik yang ditempatkan Angkatan Udara maupun Angkatan Lautnya. Dari sekian itu terbagi pada yang ditempatkan di Angkatan Laut sebesar 133 pesawat, 58 Glen Martin, 59 pesawat pemburu, dan 18 pesawat Falcon, dan sisanya berupa pesawat Koolhovens yang sudah kuno.⁵⁴ Dari jumlah sekian itu pada waktu peperangan ditambah dengan 20 pesawat Glen Martir, 24 pesawat pemburu, dan 19 pesawat transport.

Kekuatan Sekutu yang diperbantukan pada Hindia Belanda antara lain 25 pesawat Australia (Inggris) di Ambon dan 40 pesawat pembom Amerika di Pulau Jawa beserta 30 pesawat pemburunya. Dalam kekuatan laut diperbantukan

⁵⁴Onghokham, op.cit., hal. 196

3 kapal penjelajah berat, 3 kapal penjelajah ringan, dan 10 kapal perusak. Jika ditotal seluruhnya, sebetulnya sudah memadai untuk pertahanan wilayah Hindia Belanda dengan syarat penggunaannya betul-betul efektif. Hal itu tidak demikian yang diharapkan karena pesawat - pesawat itu hanya sekitar 75% yang bisa dikatakan berfungsi dengan baik, dan 25% hanya berfungsi sebagai cadangan karena masih terdapat kerusakan-kerusakan. Banyak peralatan yang sudah lama tidak terpakai karena sikap kenetralannya semenjak perang Dunia I. Sebelum perang meletus memang ada usaha-usaha perbaikan peralatan tersebut, namun belum sempurna Jepang sudah mulai mengadakan aksi militernya di wilayah Hindia Belanda.

Jepang yang tidak begitu menderita dengan depresi-ekonomi tahun 1930 dalam waktu singkat berhasil membangun industri-industrinya, termasuk industri militer. Setelah keadaan dalam negeri siap dengan pendukung-pendukungnya yang berupa para prajurit yang profesional dan perlengkapan militer yang memadai, maka jalan menuju perang telah siap dilaksanakan. Kekuatan pihak Jepang dalam penaklukan wilayah Hindia Belanda antara lain terdiri dari:

Angkatan Laut : 4 Kapal tempur, 8 kapal induk, 14 kapal penjelajah berat, 10 kapal penjelajah ringan, 61 kapal torpedo, 7 sub divisi kapal selam, sejumlah kapal penyapu ranjau, kapal transport dan kapal pembantu.

Angkatan Udara : 477 pesawat yang ditempatkan pada Angkatan laut, 591 yang ditempatkan di Angkatan Darat, sejumlah pesawat-pesawat di kapal induk, di kapal-kapal perusak besar dan kecil.

Angkatan Darat : 3 resimen tank, 83 meriam penangkis udara dan 5 Batalyon Artileri dengan senjata lengkap.⁵⁵

Dari data-data di atas tampak bahwa kekuatan material perang Jepang sangat besar. Jika dibandingkan dengan kekuatan material Hindia Belanda, menunjukkan dua kali lipatnya. Hal ini memberikan satu keunggulan bagi Jepang terhadap Hindia Belanda dalam peperangan yang terjadi.

Di samping jumlahnya yang kurang sebanding, dari segi jenisnya perlengkapan perang Jepang tampak lebih lengkap daripada perlengkapan perang Hindia Belanda. Dalam peperangan di laut Jawa hal itu dirasakan sekali terutama oleh Karl Doorman dalam melepaskan tembakan-tembakannya di mana mereka merasa kesulitan karena tertutup asap tebal sehingga menutupi sasaran-sasaran yang akan ditembaknya. Sebaliknya dari pihak Jepang terutama oleh Takagi yang tetap efektif dalam setiap tembakannya karena ada alat pengoreksi atas tindakannya berkat adanya spotterplane.⁵⁶

Hindia Belanda tidak memiliki kapal-kapal penyapuranjau yang memadai, sehingga banyak kapal Hindia Belanda terkena oleh ranjau yang dipasangnya sendiri pada sa-

⁵⁵Ibid., hal. 202

⁵⁶Djajusman, op.cit., hal. 78

at situasi mendesak untuk menghindari tembakan - tembakan dari kapal-kapal Jepang. Dalam setiap peperangan, kapal penyapu ranjau banyak diperlukan untuk menghindari kerusakan-kerusakan akibat ledakan ranjau yang dipasang musuh.

Dengan demikian baik dari segi personal maupun material perang, Jepang menunjukkan jumlah yang lebih besar dan kualitas yang lebih unggul. Banyak peralatan-peralatan perang Hindia Belanda yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipergunakan dalam peperangan, namun terpaksa dipakai. Hal itu mengakibatkan kadang - kadang mereka justru terjebak oleh kerusakan peralatan yang digunakannya. Mengingat peralatan-peralatan perang Hindia Belanda yang betul-betul siap pakai hanya 75% nya, sedangkan peralatan perang Jepang hampir semuanya siap pakai, maka ketidakseimbangan ini, mempermudah bagi Jepang dalam menaklukkan Hindia Belanda.

C. Keunggulan Strategi-Organisasi Militer Jepang

1. Kelemahan Strategi Hindia Belanda

Suatu peperangan tidak akan berhasil jika faktor yang satu tidak bisa mendukung faktor yang lainnya. Jelasnya antar personil, material, strategi koordinasi, harus sama-sama mendukung. Walaupun peralatan perang sudah modern, tetapi jika faktor strateginya lemah, maka perang itu juga diragukan kemenangannya.

Seperti telah dibahas dalam bab terdahulu bahwa setelah Perang Dunia I, Hindia Belanda memegang teguh pada prinsip kenetralannya tanpa melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Demikian halnya Hindia Belanda tidak begitu memprioritaskan kepentingan militer walaupun Jepang sudah memberikan tanda-tanda akan melakukan inovasi ke Hindia Belanda. Perencanaan strategi perang Hindia Belanda dibuat setelah betul-betul waktu sudah mendesak dan menjadikan rencana strategi militer itu tidak bisa diterapkan secara maksimal dan merata. Demikian pula perencanaan dalam rangka persekutuan dengan Inggris, Belanda, Amerika, hampir tidak ada, yang ada hanya rencana secara garis besar dan samar-samar, juga tidak ada kerjasama Inggris-Belanda terhadap musuh bersama.⁵⁷ Demi menghindari provokasi dari pihak Jepang, maka latihan-latihan strategi juga tidak pernah diadakan bersama-sama, dimana latihan tersebut sebetulnya sangat perlu untuk menerapkan rencana-rencana strategis yang telah ditentukan.

Hindia Belanda sendiri menganggap bahwa Singapura merupakan benteng pertahanan yang kuat, ditambah lagi dengan adanya hampir seluruh angkatan laut ditempatkan di Laut Utara untuk menjaga pintu-pintu masuk ke wilayah Hindia Belanda. Sedangkan di daratan Hindia Belanda tidak banyak mempersiapkan diri. Setelah Singapura jatuh

⁵⁷ Onghokham, *op.cit.*, hal. 193

ke tangan Jepang tanggal 15 Februari 1942 secara strategis benteng pertahanan bagi Hindia Belanda bisa dikatakan runtuh dan akan membawa akibat-akibat yang tidak diharapkan bagi Hindia Belanda.

Setelah Malaya dan Filipina jatuh ke tangan Jepang, situasi taktis Hindia Belanda menjadi terisolasi terutama Pulau Jawa dan armada ABDA nya. Walaupun demikian Hindia Belanda berharap bantuan-bantuan dari Sekutu dapat membantu memperkuat pertahanannya. Pada saat pertempuran di Laut Jawa, tampak tidak adanya koordinasi baik antara Hindia Belanda dengan sekutunya maupun antar anggota ABDA sendiri.⁵⁸ Hal itu terbukti antara lain dengan tidak adanya kesatuan pimpinan perang yang jelas dan juga tidak ada koordinasi pimpinan antara Belanda Inggris di satu pihak dan Amerika di lain pihak. Hal kedua yang kadang membuat kesulitan adalah antara satu dengan yang lainnya tidak mengetahui posisi dan kekuatan sekutu-sekutunya sendiri. Dengan kekurangan perlengkapan militer terutama di angkatan lautnya pada waktu perang di Laut Jawa, Hindia Belanda tidak tahu posisi lawannya juga. Dengan demikian secara taktis Hindia Belanda mudah dihancurkan oleh Jepang yang berkat spotterplane-nya dapat mengetahui di posisi mana lawan berada.

Satu hal yang merupakan kekurangperhitungan dalam ketuhan Sekutu adalah bahwa pada saat Filipina jatuh

⁵⁸Djajusman, op.cit., hal. 78

Amerika justru menggerakkan pasukannya ke Australia, bukan ke Jawa. Bila pasukan Amerika seluruhnya berkumpul di Jawa bersama Inggris dan Hindia Belanda akan merupakan suatu kekuatan yang besar. Hal itu juga yang merupakan faktor kekuatan Sekutu terpecah dan dengan dislokasi yang jauh dimana jika jalur-jalurnya diputus oleh pasukan Jepang, maka masing-masing pasukan di wilayah yang satu dengan yang lainnya menjadi terisolasi. Dengan demikian mudah bagi pasukan Jepang untuk mengalahkannya karena bantuan yang diharapkan akan sulit sampai pada tujuannya.

Jika ditelusuri lebih jauh antara Hindia Belanda, Amerika, Inggris dan Australia sebetulnya hanya persekutuan semu. Persekutuan itu tidak ada koordinasi yang jelas dan tujuan bersama yang pasti. Masing-masing hanya mementingkan perlindungannya terhadap kepentingannya di wilayah koloninya. Hindia Belanda-Inggris dan Amerika-Australia bersekutu hanya untuk melindungi wilayahnya masing-masing dengan cara menghambat dan membentengi musuh seutara mungkin sehingga dengan benteng pertahanan di utara diharapkan invasi Jepang tidak bisa sampai di sebelah selatannya atau jika bisa sampai kondisi kekuatannya sudah lemah.

Tujuan dari masing-masing negara Sekutu ternyata tidak berhasil membendung invasi Jepang dengan penaklukan-penaklukan di wilayah-wilayah yang ditujukan untuk meletakkan landasan bagi serangan-serangan berikutnya.

Demikian pula terhadap daerah-daerah tambang lebih cepat bisa dikuasai Jepang sebelum taktik bumihangus yang direncanakan Hindia Belanda belum sempat terlaksana. Dengan demikian landasan yang kuat didukung dengan subsidi minyak yang sangat dibutuhkan dalam pertempuran, dapat diterapkan Jepang dengan baik.

Masing-masing sekutu tidak mengetahui kekuatannya secara pasti, dan juga tidak mengetahui medan pertempuran secara akurat baik di darat maupun di lautan. Halfrih yang menguasai wilayah lautan di Hindia Belanda justru tidak mendapat jabatan dalam ABDACOM. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara anggota ABDACOM ditentukan berdasarkan kepentingannya, bukan didasarkan atas pengalaman masing-masing. Keadaan seperti itu tidak terjadi pada Jepang dimana semenjak pertempuran belum pecah, Jepang telah menempatkan agen-agennya untuk melihat wilayah-wilayah strategis di Hindia Belanda. Informasi-informasi tentang tempat-tempat yang akan digunakan sebagai ajang pertempuran telah diketahuinya walaupun mereka belum pernah menjajagi secara langsung. Walaupun demikian, informasi-informasi tersebut sangat berperan bagi pasukan Jepang dalam mengetahui jalur jalur yang harus dilaluinya dan kebutuhan-kebutuhan perang yang diperlukan.

Strategi perang yang digunakan Jepang adalah dengan gerakan menyerang dari utara ke selatan yang meliputi medan pertempuran barat ke timur secara serentak. Hal seperti itu mungkin dapat dilaksanakan mengingat pasukan

Jepang jumlahnya sangat besar dan peralatannya memadai. Setiap wilayah yang berhasil diduduki kemudian dikonsolidasikan dan dijadikan sebagai pangkalan baru bagi penyerangan berikutnya. Hindia Belanda yang banyak membangun landasan pesawat cuma dijaga atau ditempati oleh beberapa pesawat saja, sehingga dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Jepang. Kekosongan kekuatan Hindia Belanda di luar Jawa ini dikategorikan kecil mengingat hampir 75% kekuatannya dipusatkan di pulau Jawa.

Jepang selalu membuka pertempuran lebih dulu tanpa menunggu penyelesaian dari penaklukan suatu wilayah yang sedang dilaksanakan. Salah satu contohnya pada saat terjadi peperangan di Malaya dan Filipina Jepang sudah mulai membuka serangan-serangannya terhadap Hindia Belanda. Sekutu menjadi kewalahan untuk menentukan prioritas mana yang harus didahulukan, sehingga sekutu akhirnya harus memikirkan bantuan bagi wilayah lain yang sedang menghadapi serangan Jepang. Hal ini justru banyak memberikan dampak negatif bagi Sekutu karena segala bantuan yang dikirimkannya dapat dipatahkan Jepang di tengah jalan.

Secara umum dapat dilihat bahwa corak strategi Jepang dalam operasi-operasi amfibinya adalah dengan melakukan penaklukan satu wilayah ke wilayah lain untuk mencapai gerak cepat dalam menguasai wilayah-wilayah berikutnya. Operasi amfibi mereka selalu didahului oleh serangan udara dan dilindungi oleh kekuatan udara yang telah teratur. Sebelum Hindia Belanda sempat mengatur

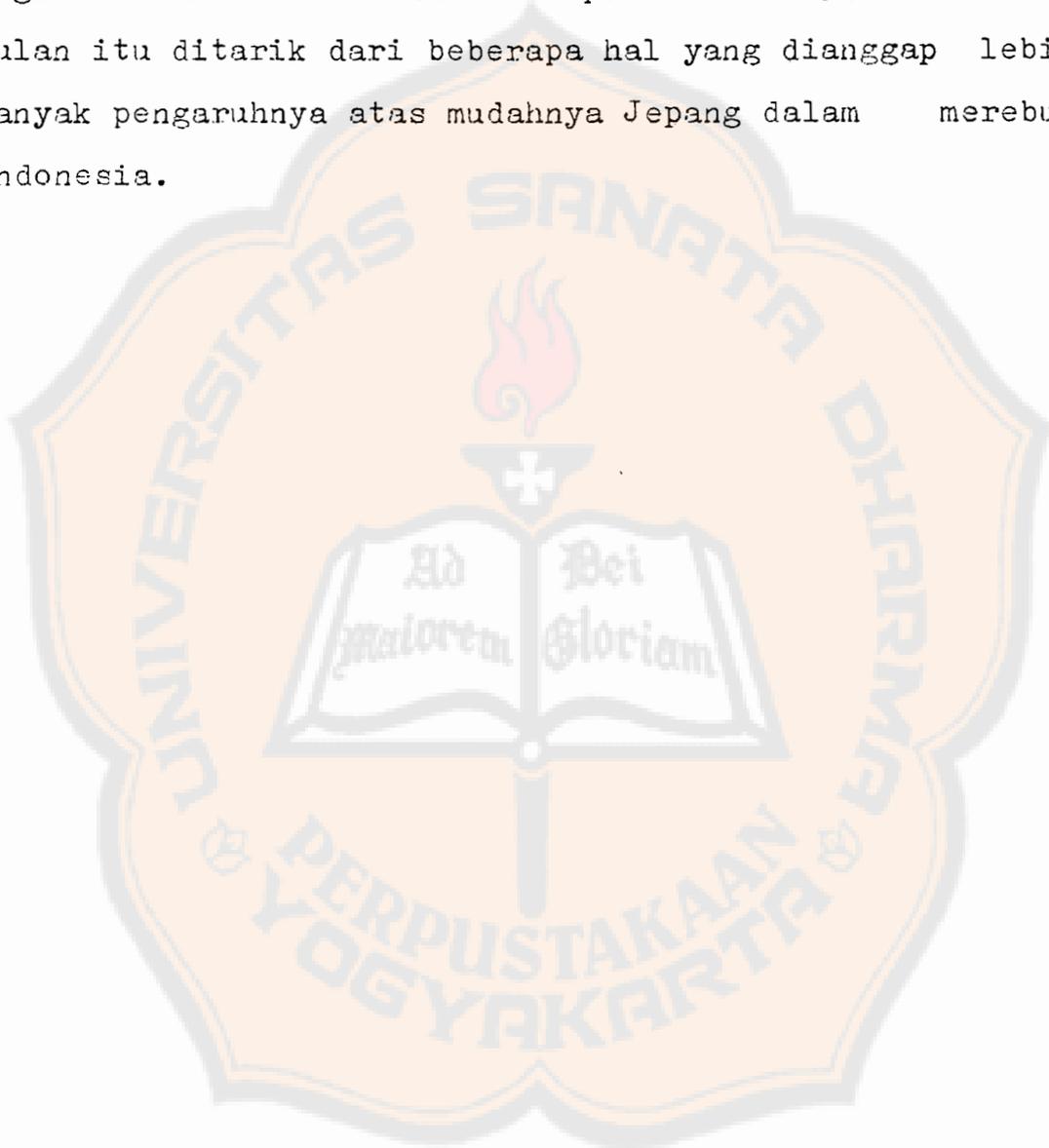
kedudukannya yang baru, mereka sudah harus menghadapi serangan pesawat-pesawat dari pangkalan Jepang yang terdekat hampir dari segala penjuru.

Dengan adanya pengisolasian suatu wilayah, juga dengan besarnya dan cepatnya pasukan Jepang dalam menyerang suatu wilayah, selalu menghilangkan keseimbangan bagi Hindia Belanda dan sekutunya. Strategi itu juga berfungsi untuk mencegah Sekutu memiliki kesempatan untuk mengatur koordinasi dan posisinya yang baru.

Pendaratan-pendaratan Jepang banyak dilakukan pada saat-saat dimana alam tidak memberikan kondisi yang terbaik, misalnya pada saat ombak-ombak besar, dan pada saat malam yang berawan atau hujan. Pada saat itulah serangan kemudian dilancarkan dimana pasukan Hindia Belanda banyak yang enggan keluar markas karena diperkirakan Jepang tidak mungkin mendarat dan melancarkan serangan. Pendaratan tersebut selalu dikomandokan oleh Angkatan Darat walaupun mereka berada di tengah lautan. Angkatan Laut Jepang berfungsi sebagai penjaga garis terdepan untuk melindungi serangan-serangan lawan dan menyapu ranjau-ranjau yang dipasang di dekat pelabuhan.

Demikianlah secara umum keunggulan-keunggulan Jepang terhadap Hindia Belanda dalam masa perang Dunia II. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh selalu menumbuhkan semangat baru bagi pasukan Jepang untuk melanjutkan serangan, dan itu sangat menjatuhkan mental para pasukan Hindia Belanda.

Pada bab berikut akan ditarik benang merah dari skripsi ini sejak dari awal hingga akhir, sehingga akan memperjelas apa saja yang menjadi faktor penyebab Jepang begitu mudah merebut Indonesia pada tahun 1942. Kesimpulan itu ditarik dari beberapa hal yang dianggap lebih banyak pengaruhnya atas mudahnya Jepang dalam merebut Indonesia.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

KESIMPULAN

Politik kolonial Belanda di Indonesia menjelang Perang Dunia II sangat kolot dan reaksioner. Gerak laju perjuangan pergerakan nasional banyak mengalami hambatan karenanya. Hal ini berdampak rakyat menjadi apathis dan pasif terhadap ancaman ekspansi Jepang atas Hindia Belanda. Adanya kekhawatiran Pemerintah terhadap tuntutan pergerakan nasional membuat mereka menerapkan politik kolonial yang menindas terhadap pergerakan nasional.

Perkembangan situasi di Asia Tenggara semakin memanas melihat perkembangan tindakan negara totaliter Jepang di wilayah Indochina. Sekutu yang telah memiliki wilayah koloni di Asia Tenggara menjadi gusar karenanya. Persekutuan negara-negara Eropa yang memiliki wilayah jajahan di Asia Tenggara lebih bersifat persekutuan semula, dimana tidak ada garis birokrasi yang jelas. Persekutuan itu lebih didasarkan atas perlindungan terhadap kepentingannya di wilayah koloninya masing-masing.

Dalam peperangan melawan Hindia Belanda, Jepang menunjukkan keunggulannya dalam kemiliterannya. Militer Jepang lebih unggul baik dalam jumlah personil maupun perlengkapan persenjataannya. Keunggulan Jepang di satu pihak berhadapan dengan kelemahan Hindia Belanda di lain pihak, memberikan dampak terhadap mudahnya Jepang mere-

but Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1942.

Pertahanan suatu negara tidak bisa terlepas dari peranan kekuatan militer beserta seluruh faktor yang mendukungnya. Kekuatan militer itu sendiri harus didukung antara lain oleh perekonomian yang kuat dan stabilitas nasional yang betul-betul mantap dalam artian yang luas. Kekuatan militer mencakup profesionalisme personil militer itu sendiri dengan dukungan fasilitas-fasilitas yang efektif dan berkualitas.

Mudahnya Jepang merebut Indonesia dari tangan kekuasaan Belanda pada tahun 1942, memberikan suatu persepsi, betapa pentingnya pembangunan pertahanan dalam suatu negara. Pembangunan pertahanan suatu negara harus disesuaikan dengan perkembangan dunia dari aspek pertahanan. Pembangunan pertahanan itu mencakup aspek profesionalisasi personilnya dan modernisasi persenjataannya dalam artian yang luas. Keseimbangan kekuatan militer suatu negara dengan negara lain juga akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya perdamaian antar negara. Keunggulan kekuatan militer satu negara akan menjadi ancaman terhadap negara-negara yang lebih lemah. Dengan demikian pembangunan pertahanan khususnya militer harus betul-betul diperhatikan, dengan didukung oleh stabilitas nasional yang betul-betul mantap dan perekonomian yang betul-betul kuat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi
1985 Pelajar Pejuang. Jakarta : Sinar Harapan.
- Benda, Harry J.
1983 Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada Masa Kedudukan Jepang (terj.) Jakarta : Pustaka Jaya.
- Bijkerk, C.
1988 Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik (Dokumenter Runtuhnya Hindia Belanda). Jakarta : Djambatan.
- Dahm, Bernhard
1987 Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta : LP3ES.
- Djajusman
1978 Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda KNIL. Bandung : Angkasa.
- Ebenstein, William
1965 Isme-isme Dewasa ini. Jakarta : Swada.
- Frederick, William H.
1989 Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia. Jakarta : Gramedia.
- Ienega, Saburo
1958 History of Japan. Tokyo : Japan Travel Boureau.
- Iwaichi, Fujiwara
1988 F.KIKAN Operasi Intelijen Tentang Jepang di Asia Tenggara Selama Perang Dunia II. Jakarta : Sinar Harapan.
- Iwa Kusume Sumantri
1963 Sedjarah Revolusi Indonesia, jilid 1. Jakarta : -
- Jong, de
1987 Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta : Kesaint Blanc.
- Kahin, George McTurnan
1952 Nationalism and Revolution in Indonesia. London : Oxford University Press.
- Kublin, Hyman
1967 The Rim of Asia : Japan and Southeast Asia. New York : Scholastic Book Services.

- Lan, Nio Joe
1962 Djepang Sepanjang Masa. Djakarta : PT Kinta.
- Larson, George D
1990 Masa Menjelang Revolusi. Yogyakarta : GAMA Pers.
- Lembaga Soekarno-Hatta
1984 Sejarah Lahirnya UUD'45 dan Pancasila. Jakarta :
Inti Idayu Pers.
- Matu Mona
1950 Penghidupan dan Perdjuangan M.H.Thamrin. Medan :
Pustaka Timur.
- Moedjanto, G.
1988 Indonesia Abad ke 20, Jilid 1, Yogyakarta : Ya-
yasan Kanisius.
- Nagazumi, Akira
1988 Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Je-
pang. Jakarta : Yayasan Obor.
- Nasution, A.H.
1977 Sekitar Perang Kemerdekaan I. Bandung : Angkasa.
- Onghokham
1988 Runtuhnya Hindia Belanda. Jakarta : Gramedia,
- Perlmutter, Anos
1984 Militer dan Politik. Jakarta : CV Rejawali.
- Pluvier, J.M.
- Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di
Indonesia. (stensil).
- Poesponegoro, Marwati Djoened
1984 Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta : PN Balai
Pustaka.
- Pringgodigdo, A.K.
1977 Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta : Di-
an Rakyat.
- Reischauer, Edwin O.
1982 Manusia Jepang. Jakarta : Sinar Harapan.
- Rosihan Anwar
1985 Musim Berganti, Sekilas Sejarah Indonesia tahun
1925-1950. Jakarta : Grafiti Pers.
- Sagimun, MD.
1989 Las Trip : Dari Brigade Pertempuran ke Brigade
Pembangunan. Jakarta : Bina Aksara.

Sagimun, MD.

1989 Peranan Pemuda Indonesia dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi. Jakarta : Bina Aksara.

Sagimun, MD.

1985 Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Jepang. Jakarta : Inti Idayu Pers. Fascisme

Sakamoto, Taro

1982 Jepang Dulu dan Sekarang. Yogyakarta : GAMA Press

Sihombing, O.D.P.

1962 Pemuda Indonesia Menentang Fascisme Djepang. Jakarta : Sinar Djaja.

Simatupang, T.B.

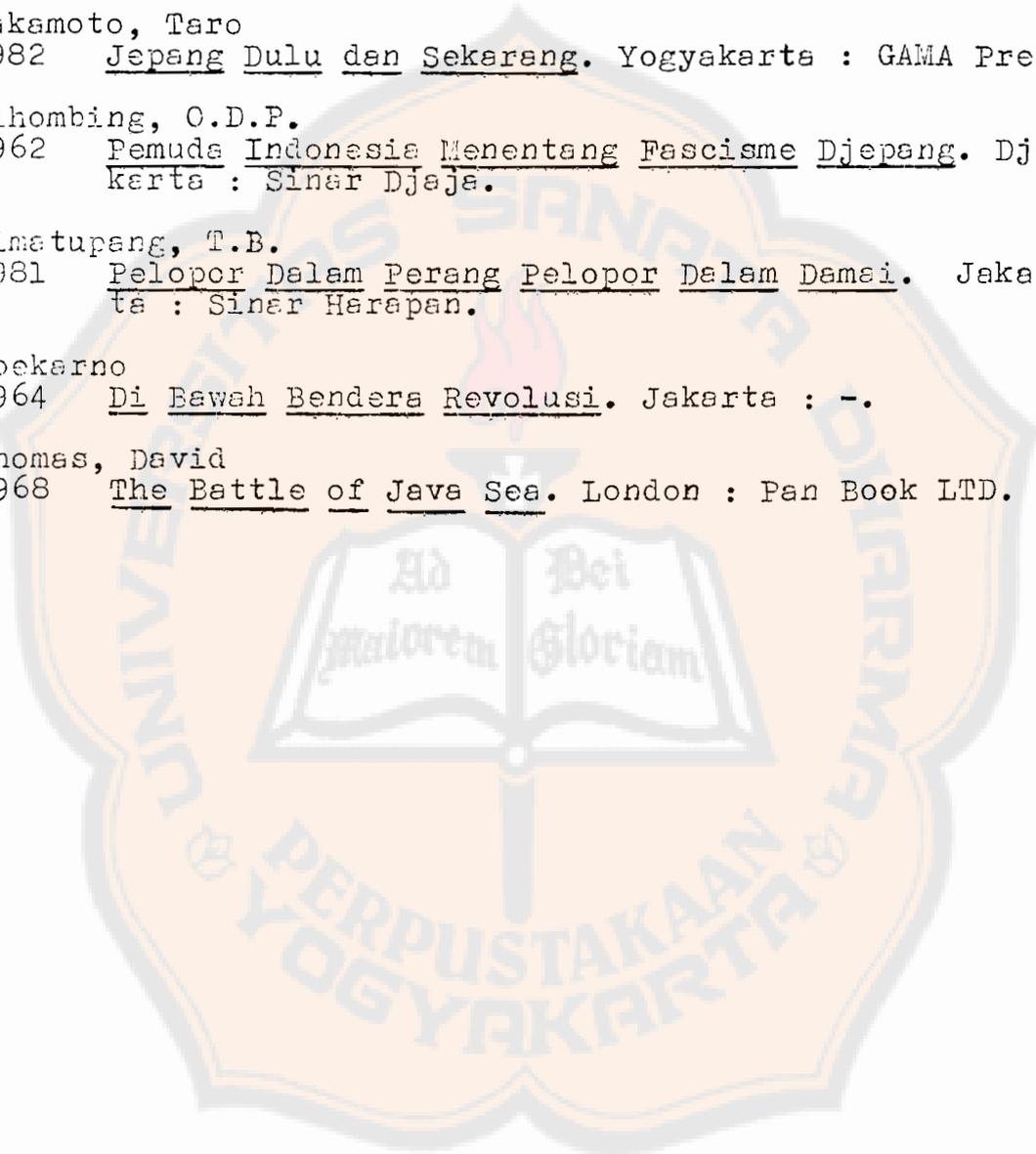
1981 Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damsi. Jakarta : Sinar Harapan.

Soekarno

1964 Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta : -.

Thomas, David

1968 The Battle of Java Sea. London : Pan Book LTD.



LAMPIRAN

Di bawah ini terdapat beberapa istilah dan pengertiannya yang dapat membantu pemahaman atas beberapa istilah yang ditemui dalam uraian-uraian skripsi ini.

1. Milisi Pribumi : adalah wajib dinas militer yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda dan dibentuk dari pendudukan sipil dalam keadaan darurat.
2. Malseise : adalah masa ketika perekonomian mengalami kesulitan dan kelesuan yang biasanya dikatakannya tentang masa sekitar tahun 1929.
3. Dumping : sistem penjualan barang di luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang sangat murah agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan.
4. Fasisme : adalah paham golongan nasionalis ekstrem kanan yang menganjurkan pemerintahan yang otoriter.
5. Petisi : adalah permohonan resmi tentang sesuatu hal oleh seseorang atau kelompok tertentu yang ditujukan kepada Pemerintah.
6. Manifest : adalah pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau kelompok tertentu.
7. Revolusi : adalah perubahan yang cukup mendasar dalam bidang tertentu dan biasanya hanya memakan waktu yang singkat.

8. Asia Timur Raya : menunjuk pada suatu rencana menyatakan seluruh wilayah Asia dalam satu keluarga kerajaan besar yang dicanangkan oleh Jepang.

